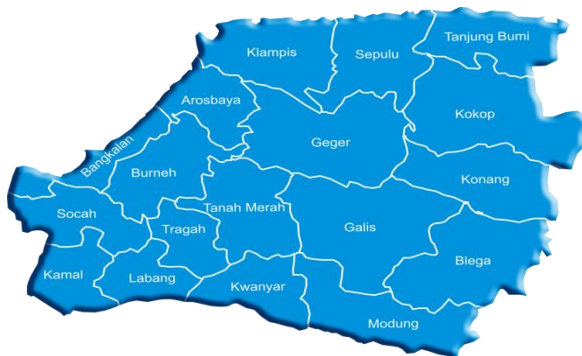




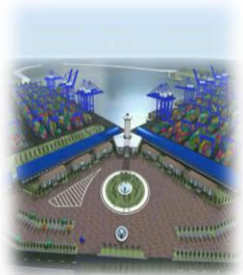
KABUPATEN BANGKALAN

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (R P J P D)

TAHUN 2005 – 2025



PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
2010**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5. Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Bangkalan 2005-2025	7
1.6. Sistematika Penyusunan	8
<u>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</u>	
2.1. Gambaran Umum Wilayah	10
2.1.1. Batas Administrasi	10
2.1.2. Kemiringan Lahan	12
2.1.3. Geologi	12
2.1.4. Jenis Tanah	13
2.1.5. Kedalaman Efektif Tanah	13
2.1.6. Tekstur Tanah	14
2.1.7. Hidrologi	14
2.1.8. Geohidrologi	16
2.1.9. Klimatologi	16
2.2. Potensi Sumber Daya Pesisir Dan Laut	17
2.2.1. Kondisi Geografis Pantai	18
2.2.2. Terumbu Karang	18
2.2.3. Mangrove	18
2.3. Penggunaan Lahan	19
2.4. Kependudukan	20
2.4.1. Jumlah Penduduk	20
2.4.2. Kepadatan Penduduk	21
2.4.3. Struktur Penduduk	21
2.4.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	21
2.4.3.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian	22

2.4.4. Pendidikan	23
2.5. Sosial Budaya Masyarakat	27
2.5.1. Karakteristik Masyarakat Bangkalan	27
2.5.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
2.5.3. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	29
2.6. Perekonomian	31
2.6.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan	31
2.6.2. Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	32
2.6.3. Sektor Tanaman Perkebunan	35
2.6.4. Sektor Peternakan	35
2.6.5. Sektor Perikanan	37
2.6.6. Sektor Industri	38
2.6.7. Sektor Pertambangan	39
2.6.8. Sistem Utilitas	39
2.6.8.1. Air Bersih	39
2.6.8.1. Persampahan	40
2.6.9. Sektor Pariwisata	41
2.6.10. Transportasi	42
2.6.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	43
2.7. Modal Dasar dan Potensi	52
<u>BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</u>	
3.1. Industrialisasi Pasca Suramadu	54
3.2. Penyiapan Infrastruktur Pendukung	55
3.2.1. Transportasi	55
3.2.2. Telekomunikasi	56
3.2.3. Sumber Daya Air	57
3.2.4. Sumber Daya Energi	58
3.3. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas Sumber Daya Manusia	58
3.4. Penurunan Produktivitas Sektor Pertanian	60
3.5. Dampak Lingkungan Pembangunan Strategis	61

BAB IV VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2005-2025

4.1.	Visi Pembangunan Daerah	62
4.2.	Misi Pembangunan Daerah	64
4.3.	Stategi Pembangunan	65

BAB V ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025	67
5.1.1.	Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	67
5.1.2.	Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	71
5.1.3.	Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah	73
5.1.4.	Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	75
5.2.	Tahapan Dan Skala Prioritas	77
5.2.1.	Tahap Pertama (2005 - 2009)	77
5.2.2.	Tahap kedua (2010-2014)	78
5.2.3.	Tahap ketiga (2015 - 2019)	80
5.2.4.	Tahap keempat (2020-2024)	81

BAB VI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.	Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah	100
6.2.	Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah	100
6.2.1.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	100
6.2.2.	Efisiensi dan Efektivitas Pendanaan pembangunan	103
6.2.2.	Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro	106

BAB VII P E N U T U P

7.1.	Kaidah	108
7.2.	Prasyarat	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan	10
Tabel 2.2.	Letak, Tinggi Dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan	12
Tabel 2.3.	Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan	13
Tabel 2.4.	Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan	13
Tabel 2.5.	Kedalaman Efektif Tanah Kabupaten Bangkalan	14
Tabel 2.6.	Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan	14
Tabel 2.7.	Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan	15
Tabel 2.8.	Beberapa Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	16
Tabel 2.9.	Banyaknya Curah Hujan Bulanan Kabupaten Bangkalan	17
Tabel 2.10.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	21
Tabel 2.11.	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2.12.	Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	23
Tabel 2.13.	Persentase Penduduk menurut Status Pendidikan Di Kabupaten Bangkalan	25
Tabel 2.14.	Banyaknya Sekolah dan Ratio Murid Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	26
Tabel 2.15.	Daftar Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.16.	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	32
Tabel 2.17.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	33
Tabel 2.18.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	35
Tabel 2.19.	Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	36

Tabel 2.20. Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	36
Tabel 2.21. Nilai Produksi Perikanan (Dalam Jutaan Rupiah)	37
Tabel 2.22. Indeks Harga yang diterima Petani, Indeks Harga yang dibayar Petani dan Nilai Tukar Petani Kab. Bangkalan Th. 2005 - 2006	38
Tabel 2.23. Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2008	39
Tabel 2.24. Produksi Air Minum Kabupaten Bangkalan Tahun 2006-2008	40
Tabel 2.25. Daftar Panjang Jalan Kabupaten Bangkalan Tahun 2008	42
Tabel 2.26. Jumlah Angkutan Darat Kabupaten Bangkalan Tahun 2006-2008	43
Tabel 2.27. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2008	44
Tabel 2.28. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2004-2008	46
Tabel 2.29. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2004 – 2008	48
Tabel 2.30. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 – 2008 (Prosen)	50
Matriks Tahapan dan Skala Prioritas	83

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Penganggaran	7
Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan	11
Gambar 2.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Bangkalan	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik sebagai berikut : *pertama* lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis; *kedua* mengikuti kecenderungan baru; *ketiga* lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

1.2 Maksud Dan Tujuan

RPJP Kabupaten Bangkalan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang berbasis potensi daerah dan melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Memberikan arah atau pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Bangkalan selama 20 tahun;
2. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;

3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten atau Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangkalan;
5. Mengoptimalkan komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).

1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Bangkalan 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi pemangku kepentingan (Stakeholder) di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Provinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Bangkalan;
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan disusun dengan mengacu, merujuk, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi, dan RTRW Kabupaten Bangkalan. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RPJP Kabupaten Bangkalan dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan

maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Umum Daerah, strategi pembangunan Daerah, dan program Pembangunan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan diserasikan melalui musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Penganggaran

BAB II

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pola penentuan isu-isu strategis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 40 menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) antara lain mencakup analisis isu-isu strategis. Dalam upaya menganalisa isu-isu strategis tersebut maka digunakan metode SWOT.

Dengan demikian isu-isu strategis Kabupaten Bangkalan sesuai dengan analisis tersebut adalah :

2.1. Industrialisasi Pasca Suramadu

Pasca dioperasionalkan Jembatan Suramadu, kabupaten Bangkalan mengalami kemajuan perekonomian yang menggembirakan. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan berasal dari sektor tersier. Perkembangan sektor industri, properti dan perdagangan juga berkembang karena adanya proses *urban sprawl* yang terjadi meluas ke Bangkalan sebagai salah satu daerah penyangga Surabaya.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi memberikan multiplier effect bagi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga adanya peningkatan investasi dan relokasi industri berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pasca suramadu antara lain :

- a. Kesiapan sumber daya manusia;
- b. Daya saing produk lokal;
- c. Lemahnya kelembagaan UMKM;
- d. Pengaruh negatif budaya asing.

Berkaitan permasalahan tersebut diatas, diperlukan adanya langkah- langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas,

meningkatkan kualitas produksi melalui pembinaan ketrampilan pada pengrajin, pemberdayaan kelembagaan UMKM serta menciptakan rasa kecintaan pada produk unggulan (lokal spesifik) dan meminimalisir pengaruh budaya asing. Di sisi lain pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Bangkalan difokuskan kepada orientasi yang mampu memberikan insentif bagi tumbuhnya simpul-simpul ekonomi berbasis keunggulan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Penyiapan Infrastruktur Pendukung

2.2.1. Transportasi

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa telah membuka akses interkoneksi arus barang, jasa dan manusia. Namun keberadaan jembatan tersebut kurang didukung infrastruktur penunjang lainnya. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan infrastruktur baru dalam kerangka pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan.

Perencanaan jaringan transportasi pada Kabupaten Bangkalan didominasi oleh transportasi darat dengan peningkatan jaringan jalan yang terinterkoneksi dengan kawasan strategis Kabupaten Bangkalan dengan rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulupandan Kecamatan Klampis sebagai pelabuhan internasional dan Pelabuhan di Kecamatan Socah yang terintergrasi dengan kawasan industri. Rencana pengembangan jaringan jalan untuk pengembangan wilayah yaitu pengembangan lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten di Madura, disamping juga pengembangan jalan-jalan sirip disekitar akses Suramadu yang merupakan rencana kawasan strategis nasional guna pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan.

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan prasarana terminal tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani trayek antar kota antar provinsi yang direncanakan di Kawasan Suramadu.

2.2.2. Telekomunikasi

Pengembangan teknologi telekomunikasi dengan masih memanfaatkan teknologi kabel menjadi kendala karena memerlukan investasi yang besar. Tetapi hal ini akan menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan jasa telekomunikasi baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi telekomunikasi.

Penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Selain mengoptimalkan jaringan telepon kabel, prasarana telematika dalam pengembangannya juga perlu penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station). Hal ini sangat penting untuk menjangkau pelosok pedesaan. Dengan perkembangan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kebutuhan dan pelayanan prasarana telematika, perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu :

- 1) Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
- 2) Pembangunan teknologi telematika pada kawasan pusat pertumbuhan;
- 3) Mengarahkan dan memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk provider seluler dengan pengelolaan dan pemanfaatan bersama.

2.2.3. Sumber Daya Air

Pengadaan air baku di Kabupaten Bangkalan sebagian besar berasal dari air permukaan dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kekurangan air permukaan. Ketersediaannya cenderung tetap setiap tahunnya, sedangkan kebutuhan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan memenuhi kebutuhan industri.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas air bersih yang digunakan untuk perkembangan wilayah dan rencana pengembangan industri di Kabupaten Bangkalan mengharuskan adanya perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan sungai untuk menjaga keberlangsungan

kelestariannya. Untuk itu perlu ditetapkan fungsi tata air yang berbasis konservasi air.

Ketersediaan sumber daya air yang cukup besar dalam kenyataannya saat ini belum dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk mengantisipasi kekekuran air di Kabupaten Bangkalan diupayakan dengan pengembangan air baku dengan rencana pengembangan sumber daya air berupa rencana pembangunan waduk blega, pemanfaatan sumber air baku alternatif, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pembangunan embung di masing-masing wilayah yang mempunyai potensi pengembangannya.

2.2.4. Sumber Daya Energi

Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah strategis Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan wilayah dan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap Kepala Keluarga akan memperoleh layanan jaringan listrik sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

2.3. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Bangkalan, tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan dan ter subordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar kelas, antar daerah, dan antar yang dikuasai dan yang menguasai, serta melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah

pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan bahkan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas vertikal untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani bukan sekedar karena dan bersumber pada kelemahan dari masyarakat miskin itu sendiri, tetapi lebih karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan masyarakat miskin yang cenderung makin kompleks dan tidak ramah kepada masyarakat miskin.

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang professional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai (mismatch) dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (bargaining) masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan subordinasi, yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

2.4. Penurunan Produktivitas Sektor Pertanian

Secara garis besar beberapa kelemahan di sektor pertanian antara lain terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industry, permukiman dan pusat perkantoran, rendahnya nilai tukar produk pertanian, lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian, mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak market friendly, kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas, kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, kurangnya sarana prasarana wilayah pendukung, pengembangan sistem agrobisnis dan ketersediaan pupuk organik dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan.

Dalam rangka menangani permasalahan di atas perlu diupayakan program yang mengarah pada perbaikan struktur produksi pangan yang meliputi :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi dengan kualitas baik;
- 2) Secara preventif dilakukan usaha untuk mewaspadai timbulnya kerawanan pangan dan gizi serta merumuskan langkah-langkah antisipasinya;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi terhadap petani.

2.5. Dampak Lingkungan Pembangunan Strategis.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya sinergisitas ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi isu global yang patut ditekankan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan. Salah satu butir dari *millenium development goals* (MDGs) adalah kelestarian lingkungan hidup yang memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Pada masa mendatang, industrialisasi tidak hanya membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan, akan tetapi juga menimbulkan efek negatif berupa pencemaran lingkungan dan alam sekitarnya, akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Dalam rangka meminimalisir dampak negatif tersebut diperlukan kebijakan industrialisasi yang mengedepankan pelestarian lingkungan.

Pengembangan prasarana lingkungan seperti tempat pembuangan akhir harus terus diperhatikan, karena semakin lama laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan tentunya membutuhkan prasarana lingkungan yang memadai. Penyediaan prasarana lingkungan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun kenyataannya justru permasalahan timbul karena kesadaran masyarakat yang kurang, sehingga tempat pembuangan akhir kurang optimal kejadian ini seperti masih dapat dilihat adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Kabupaten Bangkalan akan terus berkembang, hal ini harus mendapat tanggapan serius dalam penyediaan prasarana lingkungan seperti tempat pembuangan akhir dan pengolahan limbah beracun B3. Lokasi prasarana lingkungan perlu memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan dalam penempatan lokasi.

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

3.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bangkalan sampai saat ini, isu-isu strategis dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 adalah :

”Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani.”

Pernyataan Visi Kabupaten Bangkalan di atas, memiliki makna :

- 1) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Industri*** merupakan perwujudan bahwa Bangkalan akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan wilayah di kawasan kepulauan Madura serta mempersiapkan diri sebagai wilayah penyangga Surabaya dengan menjadikan wilayah Bangkalan sebagai kawasan industri terpadu. Pembangunan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten industri juga mengacu kepada nilai-nilai dasar agama dan budaya lokal sebagai landasan ekonomi yang kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, iklim investasi dalam meningkatkan kemajuan ekonomi daerah serta tetap melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang dicerminkan dalam hubungan kerjasama ekonomi yang erat dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
- 2) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Perdagangan*** merupakan cerminan bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bangkalan akan berorientasi pada kegiatan perdagangan baik lokal, regional, nasional, dan internasional serta menata kesiapan dalam berkompetisi pada era global;
- 3) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Jasa*** merupakan cerminan bahwa Kabupaten Bangkalan akan melakukan perubahan orientasi peningkatan penghasilan daerah dari sektor pertanian yang sangat dominan ke sektor jasa. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan

dalam rangka mewujudkan Daerah sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional;

- 4) ***Masyarakat Madani*** sebagai sistem sosial yang berlandaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Pelaksanaannya antara lain berupa pelaksanaan pemerintahan yang tunduk pada undang-undang dan terselenggaranya sistem pemerintahan yang transparan. Dalam kriteria pelaksanaan lainnya, dapat dilihat dengan adanya ***Democratic Governance*** (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan ***Democratic Civilian*** (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, *civil responsibility* dan *civil resilience*).

3.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi terciptanya Pembangunan Kehidupan Beragama, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pembangunan, Pembangunan Pemuda dan Olah Raga.

2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa, Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas), Pengelolaan Kawasan Pertambangan, Pengembangan Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

3) Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana wilayah melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara mengembangkan *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good government)* melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Hukum, Pembangunan keamanan dan ketertiban, Pembangunan Politik dan Pembangunan Komunikasi dan Informasi.

3.3. Strategi Pembangunan

Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi lokal di semua wilayah produksi domestik masyarakat Kabupaten Bangkalan, sehingga mampu menghasilkan produksi lokal dan nilai tambah bruto. Sedangkan strategi pertumbuhan yang berkualitas diupayakan melalui penciptaan basis fundamental pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh dominasi investasi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan, pemenuhan hak-hak sosial dasar masyarakat akan dapat dipenuhi secara lebih adil dan merata dalam hal hak atas pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, lapangan kerja secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) dan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku pembangunan melalui pembukaan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

4.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Tujuan Rencana Jangka Panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang tangguh sebagai arahan atau pedoman dalam pelaksanaan proses Perencanaan Pembangunan selama 20 tahun kedepan, sehingga mewujudkan tatanan masyarakat madani di Kabupaten Bangkalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4.1.1. Arah Kebijakan sesuai Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam mewujudkan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pembangunan Kehidupan Beragama

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat serta membentuk ahlak mulia dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya, dengan agenda :

- a. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan;
- b. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat beragama;
- c. Peningkatan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah;
- d. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara utuh sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial.

2. Arah Pembangunan Pendidikan

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia serta

membentuk kapasitas dalam kompetensi era globalisasi, dengan agenda :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan;
- c. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan.

3. Arah Pembangunan Kesehatan

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan agenda :

- a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan;
- d. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas;
- e. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan;
- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
- h. Peningkatan Pemahaman pola hidup sehat masyarakat.

4. Arah Pembangunan Kependudukan

Kebijakan ini diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk, dengan agenda :

- a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
- b. Peningkatan tertib administrasi kependudukan;
- c. Peningkatan pembinaan calon transmigran;
- d. Peningkatan kualitas penduduk.

5. Arah Pembangunan Ketenagakerjaan

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan pekerja, dengan agenda :

- a. Peningkatan keterampilan pencari kerja;
- b. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal;
- c. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis;
- e. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan;
- g. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan;
- h. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja;
- i. Penanganan pengangguran melalui padat karya.

6. Arah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan, memberi dan menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak, dengan agenda :

- a. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah;
- c. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- d. Penguatan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.

7. Arah Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat, dengan agenda :

- a. Pelestarian budaya lokal dan tradisional;
- b. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda;
- c. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional;
- d. Peningkatan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya;
- e. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni.

8. Arah Pembangunan Pemuda dan Olah Raga

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia di bidang olah raga yang memiliki karakter kebangsaan serta memiliki wawasan kebangsaan, dengan agenda :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda;
- c. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda;
- d. Penataan system pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga;
- f. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Parameter keberhasilan misi mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani, handal, berahlak mulia dan berbudaya ditandai dengan menurunnya konflik umat Beragama, menurunnya angka buta huruf, meningkatnya rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya partisipasi sekolah; meningkatnya angka harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevelensi kurang gizi; terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; perluasan lapangan kerja; menurunnya angka pengangguran; meningkatnya indek kesetaraan jender; menurunnya angka korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *Trafficking*; meningkatnya prestasi olah raga.

4.1.2. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan misi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai sokoguru ekonomi dan daya saing UMKM, dengan agenda :

- a. Peningkatan Usaha yang kondusif;
- b. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. Penciptaan dan Penumbuhan wirausaha baru;
- d. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
- e. Pengembangan kerjasama yang sinergis dan saling memperkuat antar wilayah Kabupaten Bangkalan dengan wilayah lain.

2. Arah Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi perindustrian dalam menopang sektor perdagangan dan jasa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan agenda:

- a. Persiapan pelayanan perijinan terpadu;
- b. Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah;
- c. Pengembangan system informasi pasar;
- d. Peningkatan promosi dan investasi daerah;
- e. Peningkatan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional.

3. Arah Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas) :

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, dengan agenda:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
- b. Penataan tugas dan fungsi penyuluh dan lembaga pendukungnya;
- c. Peningkatan produktivitas bahan pangan;

- d. Peningkatan aksesibilitas pertanian;
- e. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.

4. Arah Pengelolaan Kawasan Pertambangan

Kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan agenda:

- a. Penyusunan regulasi pertambangan;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;
- c. Pengembangan dan pembinaan usaha tambang;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

5. Arah Pengembangan Pariwisata

Kebijakan ini diarahkan pada pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan agenda:

- a. Penyusunan perencanaan pariwisata;
- b. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata;
- c. Peningkatan potensi pariwisata;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- e. Peningkatan sumber daya manusia;
- f. Peningkatan promosi pariwisata;
- g. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.

6. Arah Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan absolut, dengan agenda:

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin;
- c. Peningkatan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha;
- d. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

7. Arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan ini diarahkan pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan agenda:

- a. Peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar;

- b. Peningkatan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat;
- c. Penciptaan dan Penumbuhan Pontensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pengembangan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.

Parameter keberhasilan misi kedua ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, meningkatnya kontribusi pangan Kabupaten Bangkalan, meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, membaiknya indeks Nilai Tukar Petani/Nelayan, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

4.1.3. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan misi Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya penanganan infrastruktur transportasi guna menggerakkan roda perekonomian, dengan agenda:

- a. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- b. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
- c. Peningkatan jalan desa dan lingkungan;
- d. Pembangunan system transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.

2. Arah Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan agenda:

- a. Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air;
- b. Pengembangan sumber daya alam buatan;
- c. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
- d. Pendayagunaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengkajian dan pemanfaatan teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.

3. Arah Perumahan dan Permukiman

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pemenuhan perumahan yang sehat bagi masyarakat dan terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman guna pemerataan dan penyebaran penduduk serta pembangunan, dengan agenda:

- a. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah;
- b. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan;
- c. Pengembangan lingkungan permukiman sehat;
- d. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara;
- e. Pengembangan Teknologi Tepat Guna bidang Permukiman.

4. Arah Pengembangan Wilayah

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, dengan agenda:

- a. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal;
- b. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis;
- c. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- d. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.

5. Arah Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai peruntukan, dengan agenda:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis;
- b. Sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas kawasan yang mencakup sektor seperti status pemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana permukiman, meningkatnya luas layanan air baku serta didukung perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

4.1.4 Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam mewujudkan misi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan, dengan agenda:

- a. Penyusunan dan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.

2. Arah Pembangunan Hukum

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pemantapan fungsi dan peran pemerintah dalam penegakan supremasi hukum, dengan agenda:

- a. Penataan produk hukum sesuai herarki per undang-undangan dan kearifan lokal;

- b. Penguatan fungsi kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum;
- c. Pembangunan budaya masyarakat yang sadar hukum;
- d. Penegakan supremasi hukum.

3. Arah Pembangunan keamanan dan ketertiban

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan kondusivitas lingkungan masyarakat, dengan agenda:

- a. Penataan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian;
- c. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah;
- d. Pengembangan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

4. Arah Pembangunan Politik

Kebijakan ini diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis, dengan agenda:

- a. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya;
- b. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik;
- c. Pemantapan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.

5. Arah Pembangunan Komunikasi dan Informasi

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat sadar informasi dan transparansi, dengan agenda:

- a. Penataan layanan Informasi multimedia yang berkualitas;
- b. Perluasan jaringan dan layanan informasi;
- c. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya

transparansi informasi pelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat, menegakkan supremasi hukum dan menurunkan indeks kriminalitas.

4.2 Tahapan Dan Skala Prioritas

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1 Tahap Pertama (2005 - 2009)

Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakan pondasi untuk mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh menuju terciptanya masyarakat madani. Hal ini ditempuh melalui arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembangunan kebudayaan serta pembangunan pemuda dan olah raga untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.

Pada bidang ekonomi diupayakan untuk memulihkan dan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa; pengembangan sumber daya pertanian; pengelolaan kawasan pertambangan; pengembangan pariwisata; penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal.

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan perkuatan infrastruktur, penanganan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan perekonomian masyarakat. Kebijakan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun aspek pengelolaannya. Aspek fisik meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan sarana sumber daya air dan energi. Sedangkan aspek pengelolaan meliputi pengembangan wilayah dan regulasi pemanfaatan ruang.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur dilakukan dengan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi.

4.2.2 Tahap kedua (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, maka pembangunan tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali disegala bidang dengan menekankan upaya pembangunan kehidupan beragama; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembangunan kebudayaan serta pembangunan pemuda dan olah raga untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.

Pada tahap ini pembangunan perekonomian tetap melanjutkan sesuai dengan tahap pertama yaitu diupayakan untuk memulihkan dan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa; pengembangan sumber daya pertanian; pengelolaan kawasan pertambangan; pengembangan pariwisata; penanggulangan kemiskinan

dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi religi dan budaya yang unik. Wilayah Kabupaten Bangkalan yang masuk dalam kawasan Surabaya Metropolitan Area (SMA) merupakan pusat pertumbuhan baru dengan didukung adanya jembatan Suramadu. Topografi yang beragam, dan memiliki potensi yang tersebar pada kawasan pegunungan dan pesisir merupakan kutub pertumbuhan bagi perkembangan pariwisata di Jawa Timur. Pada sektor kepariwisataan beberapa hal yang telah direncanakan pada tahap pertama diimplementasikan dengan mengeksplorasi potensi-potensi wisata alam dan buatan, termasuk melakukan revitalisasi obyek-obyek pariwisata yang sudah berkembang.

Keberadaan jembatan Suramadu di kabupaten Bangkalan memunculkan Kawasan Strategis ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan iklim investasi. Untuk mendukung hal dimaksud pada tahap ini tetap menekankan pada peningkatan sarana dan prasarana wilayah seperti yang telah dilaksanakan pada tahap pertama melalui kebijakan optimalisasi perkuatan infrastruktur, penanganan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan perekonomian masyarakat.

Pada tahap ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan kajian kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap pertama yaitu dengan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi.

4.2.3 Tahap ketiga (2015 - 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih dimantapkan secara menyeluruh penataan kembali disegala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Pada tahap ini, pembangunan perekonomian tetap melanjutkan sesuai dengan tahap kedua melalui kebijakan peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM; peningkatan penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa; peningkatan sumber daya pertanian; peningkatan pengelolaan kawasan pertambangan; peningkatan kepariwisataan; penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang strategis sebagai bagian dari konsep Gerbang Kertosusila Plus. Posisi ini sangat menguntungkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang saling memperkuat antar wilayah. Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan upaya kerjasama antar wilayah baik yang bersifat bilateral maupun multilateral antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahap ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah strategis seperti penyediaan kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap kedua yaitu dengan tetap melakukan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi. Disamping itu untuk mendukung kemudahan didalam berinvestasi di Kabupaten Bangkalan melakukan pengembangan system dan prosedur pelayanan perijinan dengan berbasis teknologi informasi.

4.2.4 Tahap keempat (2020-2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpolah hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan.

Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Struktur perekonomian telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan lptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, pemenuhan

kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Pentahapan RPJPD Kabupaten Bangkalan tersebut, selanjutnya menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

BAB V

PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan dengan memanfaatkan kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas (*value for money*) melalui optimalisasi penerimaan daerah baik bersumber intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, efisiensi dan efektifitas pendanaan pembangunan, optimalisasi lembaga mikro.

5.2. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah

5.2.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dilakukan melalui upaya intensifikasi pajak maupun retribusi daerah dengan optimalisasi aset daerah, optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pelayanan. Sedangkan upaya ekstensifikasi diupayakan melalui perluasan pelayanan. Sedangkan upaya ekstensifikasi diupayakan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat, mengoptimalkan skema-skema bagi hasil pengolahan minyak dan gas bumi di Jawa Timur.

b. Optimalisasi Penerimaan Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dilakukan jika APBD dalam keadaan defisit dan dilakukan dengan kecukupan DCSR (*Debt Coverage Service Ratio*), hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kesehatan APBD secara lebih baik, sehingga tingkat pengembalian (*re-payment*) dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan Pinjaman Daerah jangka menengah dan jangka panjang bersumber dari pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri serta pemerintah Daerah.

c. Obligasi Daerah

Era pelaksanaan otonomi saat ini adalah saatnya bagi Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dan mulai mandiri dalam mengurus dan membangun rumah tangga daerahnya. Artinya secara operasional pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas-tugas berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Terkait dengan hal tersebut dalam menyikapi batas kemampuan APBD dalam menyediakan dana pembangunan daerah, maka daerah perlu mencari dan memanfaatkan sumber dana pinjaman yang berasal dari masyarakat dan swasta lokal atau pinjaman yang berasal dari daerah yang lebih mampu salah satunya adalah Obligasi.

5.2.2. Efisiensi dan efektifitas Pendanaan Pembangunan

a. Memperkuat dan memperluas kemitraan (*Public-Private Partnership*)

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dinegara berkembang saat ini peningkatan sektor perekonomian peran swasta semakin meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat dan memperluas kemitraan atau kerja sama yaitu pemerintahan swasta, dan masyarakat adalah:

- 1) Perumusan model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
- 2) Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra Pemerintah Daerah, dan;
- 3) Membangun model kemitraan yang efektif : kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah dengan swasta, Pemerintah dengan masyarakat antar swasta, dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan;

- 4) Kemitraan / kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai model, antara lain : *Leasses and Concession (LC)*, *Built Operations and Transfer (BOT)*, atau *Public - Private Partnership*.

b. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, terutama masyarakat disekeliling lingkungan sosial, dimana perusahaan tersebut berada yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan program-program pembangunan di Kabupaten Bangkalan, maka diharapkan adanya pepaduan program CSR dengan program pemerintah sehingga diharapkan implementasi program CSR mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Potensi CSR cukup besar dan efektifitas pemanfaatan CSR dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan integritasi pola pendanaan obyek kegiatan dalam hal sinkronisasi waktu pelaksanaan, urusan dan lokasi yang akan didanai serta jangka waktu penanganan Obyek/target group.

c. Pendanaan Pembangunan dengan Pola Cost Sharing antara Pemerintah Pusat - Provinsi - Kabupaten/Kota (*Goverment to Government Partnership*)

Pola pembiayaan model cost sharing ini dilakukan melalui kesepakatan pengalokasian belanja antara Pemerintah Pusat - Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Konsep ini untuk mengoptimalkan efektifitas belanja yang potensinya terbatas mengoptimalkan perluasan target group.

d. Mengembangkan Privatisasi /Swastanisasi

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai *The Engine of Growth* dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang seluas-luasnya (*catalystic goverment*) peran investasi swasta / masyarakat untuk sektor usaha yang *full cost recovery* dalam rangka mendorong

dan mengembangkan privatisasi/swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang secara efisien dan dikelola sektor swasta).

e. Pembentukan Regulasi Yang Mendorong Termobilisasinya Pembiayaan Oleh Swasta Dan Masyarakat

Langkah ini diarahkan untuk mobilitas potensi swasta dan masyarakat untuk pendanaan kegiatan pembangunan melalui penciptaan kerangka regulasi yang merupakan langkah strategis pemerintah kabupaten sebagai penyediaan intensif kebijakan non fiskal.

f. Efektifitas dan Efisiensi Belanja APBD

Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja diarahkan pada upaya untuk mengakomodasikan pelayanan sosial dasar dan menstimulasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas urusan dilakukan melalui belanja langsung pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

5.2.3. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro baik Bank dan Non Bank diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi disektor riil lokal pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan. Kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) yang menjadi standar operasional Bank Umum dan menjadi hambatan disektor usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan akan mampu diatasi oleh lembaga keuangan mikro ini. Kelembagaan Keuangan mikro ini non Bank dapat diintroduksi dan diintensifkan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa/kelurahan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Disamping itu kelembagaan keuangan mikro dapat pula diintroduksi sesuai dengan budaya lokal untuk memberikan peran intermediasi secara praktis, efektif dan mudah.

BAB VI

P E N U T U P

5.1 KAIDAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan :

- a. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD;
- b. Pedoman dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD di Kabupaten Bangkalan;
- c. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronasi dengan arah pembangunan di kabupaten dan kota serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
- d. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

5.2 PRASYARAT

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bangkalan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan, tiga pilar *Good Governance* yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan adalah : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
Tanggal : 09 Desember 2010
Nomor : 12 Tahun 2010

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2005 – 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik sebagai berikut : *pertama* lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis; *kedua* mengikuti kecenderungan baru; *ketiga* lebih berorientasi pada tindakan antisipatif. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*Top-Down*), dan bawah - atas (*Bottom-Up*).

1.2 Maksud Dan Tujuan

RPJP Kabupaten Bangkalan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan

pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang berbasis potensi daerah dan melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 adalah :

1. Memberikan arah atau pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Bangkalan selama 20 tahun;
2. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten atau Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangkalan;
5. Mengoptimalkan komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).

1.3 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJP Jawa Timur 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 2009 – 2029.

1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Bangkalan 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi pemangku kepentingan (Stakeholder) di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Provinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Bangkalan;
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan disusun dengan mengacu, merujuk, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi, dan RTRW Kabupaten Bangkalan. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RPJP Kabupaten Bangkalan dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Umum Daerah, strategi pembangunan Daerah, dan program Pembangunan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan diserasikan melalui musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.5 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Langkah Pertama**, Persiapan awal dilakukan dengan Penyiapan Rancangan RPJP Daerah, dilakukan untuk mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah; melalui beberapa langkah:

a) mengkaji

- a) mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, b) melakukan serangkaian konsultasi untuk menemukan inisiatif baru, c) mempersiapkan kerangka konseptual;
- b. **Langkah Kedua**, Konsultasi publik dan/atau penjangkaran aspirasi masyarakat atas Rancangan RPJP Daerah dalam menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan strategis Kabupaten Bangkalan, hasil kajian, opini publik, hasil lokakarya perencanaan strategis, dan hasil temu stakeholders Kabupaten Bangkalan;
- c. **Langkah Ketiga**, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah serta untuk mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah;
- d. **Langkah Keempat**, Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah, dengan bahan masukan utama dari hasil kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- e. **Langkah Kelima**, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah;
- f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.

1.6 Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan keterkaitan dokumen perencanaan, proses penyusunan, sistematika penyusunan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting, potensi wilayah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan RPJPD;
- Bab III Analisis Isu-isu Strategis, memuat tentang isu-isu daerah yang pada dasarnya adalah masalah/persoalan/agenda yang perlu dan harus dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan selama 20 tahun ke depan;
- Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025, yang memuat visi pembangunan Kabupaten Bangkalan dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut;
- Bab V Arah kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang memuat kebijakan dan periodisasi pentahapan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangkalan;
- Bab VI Pendanaan Pembangunan Daerah;
- Bab VII Penutup yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Batas Administrasi

Kabupaten Bangkalan berada pada bagian sebelah barat Pulau Madura, terletak pada koordinat $112^{\circ}40'06''$ – $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur serta $6^{\circ}51'39''$ – $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah 1.260,14 Km² terbagi menjadi 18 kecamatan, 273 desa dan 8 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan terlihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

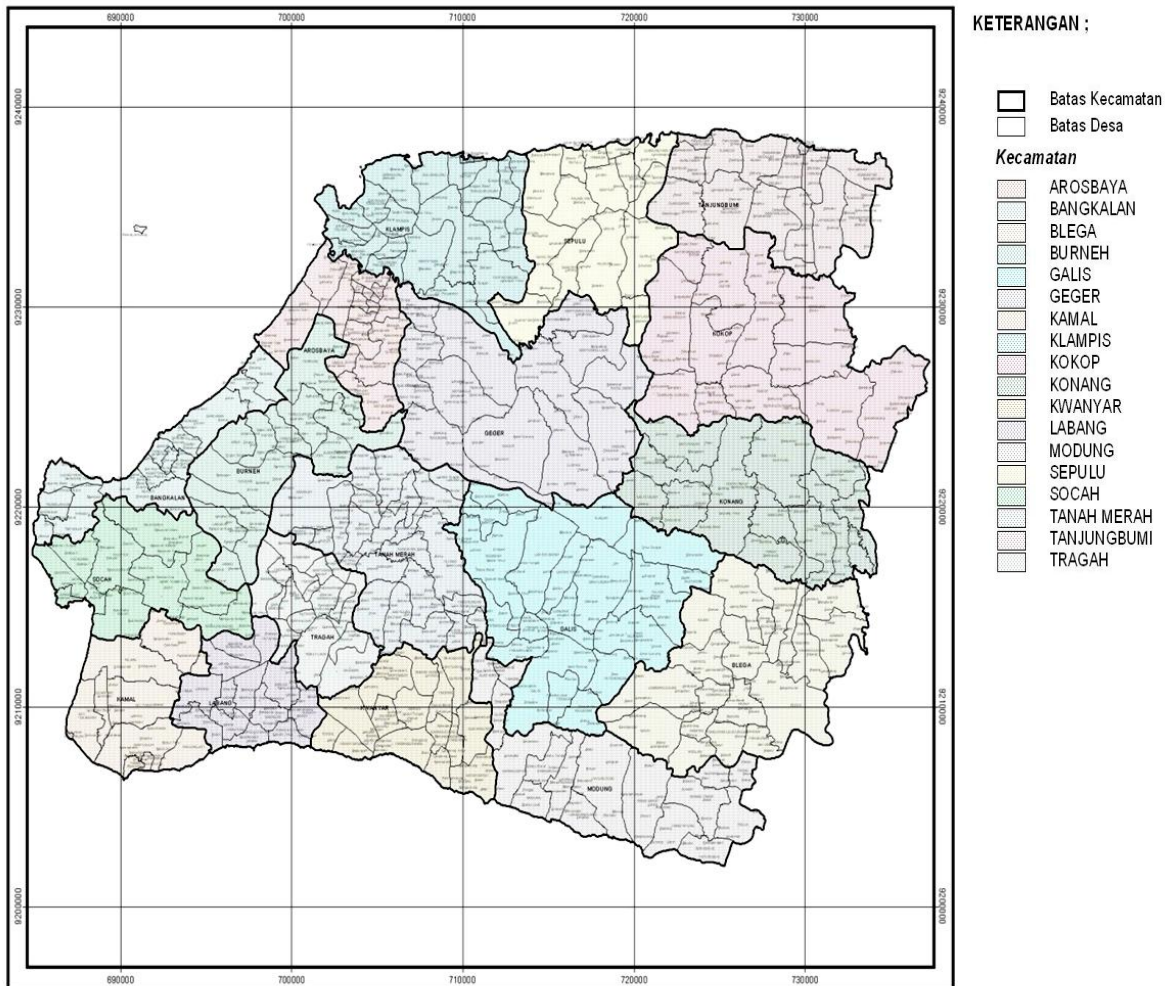
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Selat Madura

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan/Desa
1	Kamal	4.140	10
2	Labang	3.523	13
3	Kwanyar	4.781	16
4	Modung	7.879	17
5	Blega	9.282	19
6	Konang	8.109	13
7	Galis	12.056	21
8	Tanah Merah	6.856	23
9	Tragah	3.958	18
10	Socah	5.382	11
11	Bangkalan	3.502	13
12	Burneh	6.610	12
13	Arosbaya	4.246	18
14	Geger	12.331	13
15	Kokop	12.575	13
16	Tanjung Bumi	6.749	14
17	Sepulu	7.325	15
18	Klampis	6.710	22
Jumlah		126.014	281

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan

Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 diatas permukaan laut.

Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Letak, Tinggi Dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Tinggi Dari Permukaan Laut	Luas (Ha)
1	Kamal	5	4.140
2	Labang	45	3.523
3	Kwanyar	2	4.781
4	Modung	5	7.879
5	Blega	5	9.282
6	Konang	38	8.109
7	Galis	45	12.056
8	Tanah Merah	47	6.856
9	Tragah	19	3.958
10	Socah	5	5.382
11	Bangkalan	5	3.502
12	Burneh	10	6.610
13	Arosbaya	4	4.246
14	Geger	100	12.331
15	Kokop	80	12.575
16	Tanjung Bumi	2	6.749
17	Sepulu	2	7.325
18	Klampus	2	6.710
	Jumlah	-	126.014

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.1.2. Kemiringan Lahan

Kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan dilihat dari kemiringannya sebagian besar memiliki kemiringan 2-15 % yaitu sekitar 50,45 % atau 63.002 Ha. Dan kemiringan 0-2 % sekitar 45,43 % atau 56.738 Ha. Sedangkan Tekstur tanah sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 116.267 Ha atau sekitar 93,10 % dan untuk kedalaman efektif tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki kedalaman >9,980 cm yaitu seluas 64.131 Ha atau 51,35 %.

2.1.3. Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi; Alluvium seluas 25.526 Ha atau sekitar 20,25 %, Elistosin, Fasies, Sedimen seluas 35.594 Ha sekitar 28,25 Fliose, Fasies Batu Gamping seluas 47.294 Ha atau sekitar 37,87 % dan Miosen, Fasies Sedimen seluas 17.600 Ha atau 13,97 %. Luas dan kondisi Geologi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Luas (Ha)	%
1	Alluvium	25.526	20,25
2	Elistosin, Fasies, Sedimen	35.594	28,25
3	Fliose, Fasies Batu Gamping	47.294	37,53
4	Miosen, Fasies Sedimen	17.600	13,97
	Jumlah	126.014	100

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Kekuningan, Asosiasi Hidromurf, Litosol, Regosol Coklat Kekuningan, Komplek Graund Gorset Kelabu dan lits, Grumosol Kelabu, Kpl. Grumosol Kelabu Litosol, Kpl. Mediteran Coklat dan Litosol, Kpl. Mediteran Merah dan litosol, Kpl. Mediteran Grumosol Regosol Litosol. Gambaran dan luas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Luas (Ha)	%
1	Aluvial Hidromurf	10.421	8,27
2	Aluvial Kelabu Kekuningan	3.566	2,83
3	Asosiasi Hidromurf	10.724	8,51
4	Litosol	2.583	2,05
5	Regosol Coklat Kekuningan	2.646	2,10
6	Komplek Graund Gorset Kelabu dan lits	19.973	15,85
7	Grumosol Kelabu	2.583	2,05
8	Kpl Grumosol Kelabu Litosol	2.836	2,25
9	Kpl. Mediteran Coklat dan Litosol	16.155	12,82
10	Kpl. Mediteran Merah Litosol	13.988	11,10
11	Kpl. Mediteran, Grumosol, Regosol, Litosol	40.522	32,18
		126.014	100

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.1.5. Kedalaman Efektif Tanah

Kedalaman efektif tanah menggambarkan ketebalan tanah dan sejauh mana akar tanaman dapat berkembang. Besarnya diukur dari permukaan tanah sampai dengan lapisan di mana akar tanaman tidak dapat lagi menembusnya. Lapisan tersebut biasanya berupa penghalang fisik yang berupa batuan atau lapisan kedap akar. Pada keadaan tertentu lapisan tersebut dapat berupa suatu lapisan yang secara kimia mengandung racun yang mematikan akar tanaman. Kedalaman efektif

tanah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan terletak pada kedalaman 0 cm - >90 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kedalaman Efektif Tanah Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Luas (Ha)	%
1	0 cm - 30 cm	8.115	6,44
2	30 cm - 60 cm	14.416	11,45
3	60 cm - 90 cm	38.762	30,76
4	>90 cm	64.709	51,35
	Jumlah	126.014	100

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.1.6. Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah kasar halusnya bahan padat organik tanah berdasarkan perbandingan fraksi pasir, lempung debu dan air. Tekstur ini akan berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di tanah tersebut. Tekstur tanah di Kabupaten Bangkalan bertekstur tanah halus (liat), sedang hingga kasar dengan luasan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Luas (Ha)	%
1	Sedang	117.319	93,10
2	Halus	8.090	6,42
3	Kasar	0.605	0,48
	Jumlah	126.014	100

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.1.7. Hidrologi

Sebagai bagian dari siklus hidrologi, di Kabupaten Bangkalan terdapat sejumlah mata air, waduk dan sungai. Pola aliran permukaan dapat dilihat dari pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sungai-sungai utama dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan bermuara di selat Madura dan Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Nama dan panjang sungai di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Kamal	Gulung	2,15
2	Labang	Gladak Cina	7,55
3	Kwanyar	Kolpoh	16,15
4	Modung	Jangklompang	7,25
5	Blega	Blega	9,95
6	Konang	Nagen	12,15
7	Galis	Olbek	8,15
8	Tanah Merah	Pacentan Pangeleyan	5,52 2,15
9	Tragah	Pocong	7,35
10	Socah	Gladak Landung	8,25
11	Bangkalan	Bangkalan Bancaran	6,25 5,25
12	Burneh	Jambu Bubut	7,55 5,19
13	Arosbaya	Taburjan Asem Tanto Tambangan	1,85 7,20 4,00
14	Geger	Dungruduk/Patemon	10,30
15	Kokop	Dupok	5,95
16	Tanjung Bumi	Tambak/Tagungguh Torpong/Planggiran Budduh	9,15 7,05 7,15
17	Sepulu	Gladak Mati Srogan	7,55 7,55
18	Klampus	Brumbung	4,70

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Selain dipengaruhi oleh adanya sungai, kondisi hidrologi di Kabupaten Bangkalan juga dipengaruhi oleh beberapa sumber air. Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Bangkalan mempunyai kualitas air baku yang cukup baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih. Terdapat 60 lokasi sumber air yang mempunyai debit yang relatif besar. Dari ke-60 sumber air tersebut, sumber air Pocong mempunyai debit terbesar yaitu 200 liter/detik, sehingga oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk di bawah pengelolaan PDAM. Pada tabel 2.8. berikut ini, beberapa lokasi sumber air di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Beberapa Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Sumber Air	Lokasi (Kecamatan)	Jarak(KM)	Kapasitas (lt/dt)
1	Gening	Kamal	35	207
2	Pocong	Tragah	30	4.500
3	Buluh	Socah	27	160
4	Klompek	Modung	53	75
5	Langkap	Modung	53	200
6	Kesatrian	Modung	53	180
7	Banyuputih	Galis	25	80
8	Karang Gentang	Kwanyar	40	63
9	Mantan	Kwanyar	40	65
10	Duwak	Arosbaya	13	84
11	Kemarong	Geger	20	150
12	LB. Paseser	Sepulu	7	82
13	Cobik	Bangkalan	17	250

Sumber Data : Rencana Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

2.1.8. Geohidrologi

Air tanah merupakan salah satu sumber utama bagi penduduk, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, irigasi dan industri. Air tanah yang mungkin dapat dimanfaatkan adalah air tanah dangkal berupa sumur dan air tanah dalam. Potensi air tanah dapat dikembangkan dan dapat dilestarikan dengan memahami perilaku geohidrologi. Perilaku ini dapat dipahami dengan mengetahui potensi akuifer yang ada. Berdasarkan peta Geohidrologi yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan mempunyai kapasitas air tanah yang bervariasi dari nol sampai 10 lt/dt. Berdasarkan Peta potensi air tanah atau Akuifer di Kabupaten Bangkalan, menunjukkan adanya ketersediaan yang cukup tinggi, namun demikian dijumpai ada beberapa daerah yang dianggap kering, terutama dimusim kemarau. Disekitar Kecamatan Kamal dan Labang, akuifer berproduksi rendah, sedangkan disekitar daerah Burneh, Kwanyar, Galis dan Tanjung Bumi terdapat akuifer produksi kecil.

2.1.9. Klimatologi

Tinggi curah hujan di Kabupaten Bangkalan adalah 68.00 mm sedangkan rata-rata curah hujan sebesar 16,38 mm. Hal tersebut menunjukkan wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki curah hujan sedang

hingga rendah, tetapi fluktuasi curah hujan dari bulan ke bulan dalam setahun cukup stabil. Banyaknya curah hujan bulanan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Banyaknya Curah Hujan Bulanan Kabupaten Bangkalan

No	Seksi Pengairan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Rata-Rata
1	Bangkalan	201	210	193	60	186	58	0	20	0	111	104	241	115
2	Socah	339	239	288	74	64	69	0	5	0	185	324	288	156
3	Burneh	227	222	277	136	132	16	0	28	0	163	281	281	146
4	Kamal	11	26	148	101	3	6	0	0	0	10	74	68	37
5	Arosbaya	118	238	55	10	34	12	0	53	0	62	74	364	85
6	Labang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Sukoliilo	309	134	142	80	13	0	0	0	0	104	127	419	110
8	Tragah	303	184	273	154	38	7	0	4	10	90	311	363	144
9	Klampis	234	262	93	4	48	20	0	1	0	37	40	160	74
10	Tanah Merah	220	260	330	180	40	17	0	0	10	130	260	490	161
11	Kwanyar	242	93	122	192	15	67	0	9	0	25	136	478	114
12	Geger	298	404	250	61	125	96	0	117	35	160	274	340	180
13	Tanjung Bumi	195	225	79	10	0	360	0	0	0	70	101	100	95
14	Sepulu	0	382	144	0	91	47	0	60	0	69	55	171	84
15	Dupok	233	249	194	65	61	49	0	0	0	114	174	292	127
16	Galis	327	110	134	86	43	18	0	11	42	89	112	372	112
17	Modung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Konang	224	266	266	115	14	51	0	25	127	0	159	280	127
19	Blega	249	417	417	218	46	20	0	40	45	279	483	301	217
20	Kedungdung	210	288	288	38	67	1	0	0	0	0	100	122	92

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.2. Potensi Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Kabupaten Bangkalan sebagian wilayahnya berbatasan langsung Selat Madura dan Laut Jawa. Terdapat 10 (sepuluh) wilayah Bangkalan yang berbatasan langsung dengan perairan laut yakni Kecamatan Modung, Kwanyar, Labang, Kamal, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi.

2.2.1. Kondisi Geografis Pantai

Secara geografis wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki panjang pantai 125 km yang tersebar pada sepuluh kecamatan dan berkarakteristik yang beragam. Pada pantai selatan memiliki perilaku arus dengan kecepatan sedang, pada saat tertentu arus air laut sekitar 2 m/dt, gelombang tidak terlalu besar tetapi pada bulan tertentu dimana musim angin berhembus dari timur gelombang laut bisa mencapai 2 m. Pada keadaan ini akan berpotensi terjadi abrasi, sehingga dapat mengakibatkan perubahan garis pantai. Pada pantai barat memiliki arus dengan kecepatan besar, pada saat tertentu arus air laut mencapai 5 m/dt, hal ini dimungkinkan bahwa pada posisi ini Selat Madura adalah sempit, sementara perbedaan fase pasang surut cukup. Pada pantai utara memiliki perilaku arus dengan kecepatan rendah, namun gelombang laut tergolong besar karena pantainya menghadap laut lepas, bathimetri yang ada relatif landai dan kebanyakan berpasir, memiliki gelombang yang relatif besar sehingga rawan terjadinya kerusakan pantai.

2.2.2. Terumbu Karang

Potensi terumbu karang di perairan pantai Bangkalan diperkirakan terdapat di perairan Kecamatan Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi, Bangkalan dan Arosbaya karena ditemukan indikasi adanya tanah dasar yang keras yang memungkinkan digunakan sebagai substrat pertumbuhan terumbu karang. Transplantasi terumbu karang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan yang dikembangkan di perairan Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi yang bertujuan untuk melestarikan terumbu karang.

2.2.3. Mangrove

Hutan Mangrove, memiliki fungsi ekologis sebagai barier pantai terhadap gempuran gelombang, juga sebagai habitat tempat berkembang biaknya jenis ikan, udang dan jenis hewan vertebrata, tempat berkembang dan berlindung burung dan fauna lainnya, kondisinya menunjukkan

degradasi yang disebabkan oleh konversi untuk kegiatan industri, pembangunan sarana fisik, pengembangan wilayah penduduk lainnya. Degradasi ini akan diperkirakan meningkat jika tidak ada upaya pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu oleh dinas dan instansi terkait serta masyarakat.

Jenis Mangrove di Kabupaten Bangkalan terdiri atas *Rhizophora Kukronata*, *Bugha Gyimuorhsza* (potot), *Avicenia Marvis* (Api-api), *Avicenia Alba* (Api-api putih), *Sounetia Alba* (Prapat), *Sounetia Cakolanis* (Bugem), *Exocais Abalocha* (Malengen), *Lumitsin Resemosa* (Truntum) dan *Xyelocolpus Mokcercis* (Jombok).

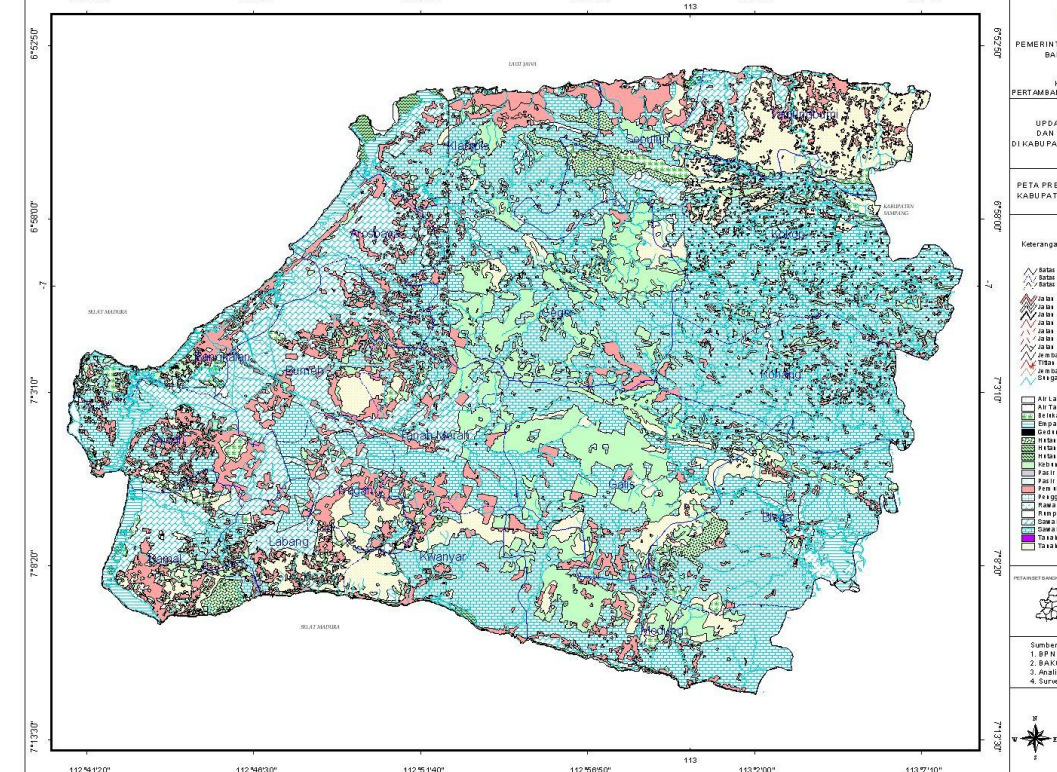
2.3. Penggunaan Lahan

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan Wilayah Indonesia Timur mempunyai potensi pengembangan wilayah yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 Km² yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan militer dan lain-lain.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman, fasilitas umum maupun untuk pengembangan industri. Pengembangan pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah pengembangan kawasan Suramadu. Setelah di bukanya jalur atau akses Suramadu maka kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu khususnya disekitar kawasan kaki jembatan Suramadu.

Saat ini kawasan tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal, lahan yang ada di sepanjang kanan maupun kiri jalur menuju jembatan masih berupa lahan kosong yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun tegalan, sedangkan disepanjang koridor jalan utama mulai tumbuh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal berupa warung-warung non permanen yang menjual souvenir, makanan maupun minuman. Kondisi yang kurang teratur dan tidak tertata dengan baik

Secara umum pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Ba



Gambar 2.2. Pengguhaan Lahan Kabupaten Bangkalan

2.4. Крестовидный

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 hingga 2008. Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sebanyak 902.342 jiwa, pada tahun 2006 sebanyak 921.141 jiwa, pada tahun 2007 sebanyak 940.331 jiwa dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 956.996 jiwa. Jumlah penduduk terus

terdapat di Kecamatan Galis sebanyak 74.068 Jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Tragah sebesar 27.500 jiwa.

2.4.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan Kotor adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas keseluruhan. Jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 956.996 jiwa dengan luas wilayah 126.014 Ha sehingga pada tahun 2008 kepadatan kotor di wilayah perencanaan sebesar 8 jiwa/Ha. Kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Bangkalan sebesar 20 jiwa/Ha dan terendah adalah Kecamatan Geger dan Kokop sebesar 5 jiwa/ha. Selengkapnya lihat tabel 2.10.

Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Kamal	47.687	4.140	12
2	Labang	36.799	3.523	10
3	Kwanyar	46.249	4.781	10
4	Modung	50.001	7.879	6
5	Blega	60.032	9.282	6
6	Konang	44.880	8.109	6
7	Galis	74.068	12.056	6
8	Tanah Merah	60.838	6.856	9
9	Tragah	27.500	3.958	7
10	Socah	57.783	5.382	11
11	Bangkalan	72.309	3.502	21
12	Burneh	59.111	6.610	9
13	Arosbaya	42.802	4.246	10
14	Geger	65.166	12.331	5
15	Kokop	64.823	12.575	5
16	Tanjung Bumi	49.262	6.749	7
17	Sepulu	44.875	7.325	6
18	Klampis	52.812	6.710	8
Jumlah		956.996	126.014	8

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.4.3. Struktur Penduduk

2.4.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2008 menurut jenis kelamin maka dapat dilihat bahwa komposisi jumlah antara laki-laki dan perempuan hampir sebanding yaitu 52 % (500.924 jiwa) perempuan dan

48 % (456.072 jiwa) laki-laki dengan sex ratio 90,76. Data selengkapnya lihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kamal	22.855	24.831	47.687	92,0
2	Labang	17.230	19.569	36.799	88,0
3	Kwanyar	21.666	24.583	46.249	88,1
4	Modung	24.166	25.835	50.001	93,5
5	Blega	28.882	31.150	60.032	92,7
6	Konang	21.767	23.112	44.880	94,1
7	Galis	35.757	38.311	74.068	93,3
8	Tanah Merah	29.031	31.807	60.838	91,2
9	Tragah	12.555	14.945	27.500	84,0
10	Socah	27.263	30.520	57.783	89,3
11	Bangkalan	34.892	37.417	72.309	93,2
12	Burneh	28.656	30.454	59.111	94,1
13	Arosbaya	19.828	22.974	42.802	86,3
14	Geger	30.410	34.756	65.166	87,5
15	Kokop	31.771	33.051	64.823	96,1
16	Tanjung Bumi	23.726	25.536	49.262	92,9
17	Sepulu	21.908	22.967	44.875	95,3
18	Klampus	23.708	29.105	52.812	81,4
Jumlah		456.072	500.924	956.996	90,7
Prosentase (%)		48	52	100	

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.4.3.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mayoritas penduduk di Kabupaten Bangkalan bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 55,9 % dari jumlah penduduk keseluruhan, Selain didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, penduduk juga bekerja dibidang pertambangan, industri, listrik, konstruksi, jasa kemasyarakatan lain lain sebagainya. Data selengkapnya mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut ini :

Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Lapangan Usaha									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kamal	7.291	0	0	0	0	2.189	1.391	1.125	5.564	266
2	Labang	13.635	2.193	1.875	0	2.511	4.329	2.244	0	1.284	0
3	Kwanyar	9.345	0	0	0	267	2.670	1.068	0	1.335	267
4	Modung	12.015	0	0	0	0	2.670	534	0	2.136	267
5	Blega	14.952	0	534	0	1.068	2.136	534	0	1.068	267
6	Konang	16.020	0	801	0	267	534	267	0	267	1.068
7	Galis	25.098	0	534	267	801	4.272	534	0	267	0
8	Tanah Merah	15.753	267	1.602	0	534	3.471	1.869	801	3.204	0
9	Tragah	9.993	0	1.068	0	1.392	3.534	642	0	4.017	267
10	Socah	10.947	534	2.670	0	1.068	1.335	1.068	1.068	1.335	534
11	Bangkalan	750	0	0	0	0	4.875	2.625	1.875	14.625	750
12	Burneh	6.783	267	1.068	0	642	5.994	909	0	8.670	642
13	Arosbaya	6.891	0	0	0	1.392	5.676	1.659	0	750	909
14	Geger	19.224	801	801	0	1.335	267	267	0	2.136	0
15	Kokop	18.690	0	1.335	0	534	1.602	801	0	801	0
16	Tanjung Bumi	12.771	081	3.534	0	1.068	4.659	2.034	0	2.778	0
17	Sepulu	15.219	0	0	0	267	1.602	534	0	801	1.869
18	Klamps	12.947	534	0	0	1.662	6.005	1.019	0	2.572	267
Jumlah		228.324	5.397	15.822	267	14.808	57.820	19.999	4.869	53.610	7.373
Prosentase		55,9	1,3	3,9	0,1	3,6	14,2	4,9	1,2	13,1	1,8

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Keterangan :

1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Minum;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi;
7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi;
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan;
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan;
10. Lainnya.

2.4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan adalah upaya sadar seorang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta memperkuat wawasan.

Pada

Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga. Dalam perencanaan program pendidikan, diperlukan informasi atau data sebagai keterangan penunjang, antara lain data mengenai jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah, jumlah sarana pendidikan dan rasio-murid sekolah.

Data jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah diperlukan untuk perkiraan kebutuhan sarana pendidikan seperti guru, gedung sekolah, kelas dan kebutuhan lain untuk menunjang proses pendidikan. Kelompok usia yang dipilih untuk kebutuhan analisa biasanya adalah 7-12 tahun untuk SD (walaupun seiring dengan perkembangan jaman banyak pula anak umur 5-6 tahun yang sudah masuk SD), umur 13-15 tahun untuk SLTP, umur 16-18 tahun untuk SLTA dan lebih dari 18 tahun untuk perguruan tinggi.

Dari data SUSENAS 2008 (tabel 2.13.) dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bangkalan yang sementara masih mengenyam pendidikan dasar (umur ≤ 15 tahun) sebesar 89,98 persen dari total kelompok umur tersebut, sedangkan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 1,34 persen dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 8,68. persen. Kelompok umur yang masuk pendidikan dasar 7-12 tahun untuk SD dan 13-15 untuk SMP. Dengan rincian persentase untuk kelompok umur SD (7-12 tahun) dengan 97,41 persen dari total keseluruhan penduduk pada kelompok umur tersebut. Dan untuk kelompok umur SMP (13-15 tahun) dengan 70,45 persen dari total keseluruhan penduduk pada kelompok umur tersebut.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah (umur 16-18 tahun), penduduk yang masih sekolah sebesar 39,11 persen, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,77 persen dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 57,12 persen. Untuk pendidikan tinggi (umur 19-24 tahun), penduduk yang masih bersekolah sebesar 4,98 persen, sedangkan penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah 6,98 persen, dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 88,04 persen. Dari data-data diatas menunjukkan bahwa minat penduduk Kabupaten

Bangkalan dalam menuntut ilmu masih rendah . Dimana pada kelompok usia muda (umur 16-18 tahun) hanya 39,11 persen yang masih sekolah, artinya hampir 61 persen dari penduduk Bangkalan berusia muda yang seharusnya masih menuntut ilmu di bangku sekolah SMU/SMK/MA sudah tidak bersekolah lagi.

Dari table 2.13. dapat dijelaskan bahwa penduduk usia muda (umur 7-24 tahun) yang ada di Bangkalan, yang tidak/belum pernah sekolah 1,51 persen adalah berumur 7-12 tahun, 0,88 persen berumur 13-15 tahun, sebanyak 3,77 persen berumur 16-18 tahun dan 6,98 persen berumur 19-24 tahun. Sedangkan penduduk usia muda yang masih sekolah sebanyak 97,41 persen berumur 7-12 tahun, sebanyak 70,45 persen berumur 13-15 tahun, 39,11 persen berumur 16-18 persen dan 4,98 persen berumur 19-24 tahun. Demikian juga halnya dengan penduduk yang tidak bersekolah lagi sebanyak 57,12 persen berumur 16-18 tahun dan 88,04 persen berumur 19-24 tahun.

Tabel 2.13 Persentase Penduduk Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

KELOMPOK UMUR	TDK/BLM PERNAH SEKOLAH	MASIH SEKOLAH	TDK BERSEKOLAH LAGI	TOTAL
7-12	1,51	97,41	1,08	100
13-15	0,88	70,45	28,67	100
16-18	3,77	39,11	57,12	100
19-24	6,98	4,98	88,04	100

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan (BPS) 2008

Untuk mencapai tingkat pendidikan yang di harapkan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah (pusat maupun daerah) telah memahami hal ini, namun semua ini membutuhkan upaya keras dan didukung dana yang besar pemerintah telah merespon akan arti pentingnya pendidikan dengan sejumlah kebijakan yang pada intinya ingin membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Apalagi dalam UUD 1945 pasal 31 telah disebutkan bahwa pendidikan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, mulai masyarakat bawah

(tidak mampu)

(tidak mampu) hingga masyarakat mampu. Pasal itu, juga bisa di tafsirkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator pendidikan.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah adalah pengadaan tenaga pengajar dan gedung sekolah. Sebab disanalah tempat yang ideal untuk proses transfer ilmu, dan merupakan tempat yang cocok dalam proses belajar mengajar. Tabel 2.14. dibawah ini menyajikan informasi mengenai jumlah gedung sekolah dan rasionya dengan murid.

Tabel 2.14 Banyaknya Sekolah dan Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

JENJANG PENDIDIKAN	NEGERI	SEKOLAH SWASTA	JUMLAH	MURID	RASIO MURID SEKOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	659	5	664	129.049	194
MI	2	110	112	16.584	148
(SD&MI)	661	115	776	145.633	188
SLTP	39	81	120	27.339	228
MTs	1	86	87	11.206	129
(SLTP&MTs)	40	167	207	38.545	186
SMU/SMK	13	31	44	11.845	269
MA	1	34	35	4.038	115
(SMU/SMK & MA)	14	65	79	15.883	201

Sumber : Bangkalan Dalam Angka (BPS) 2009

Rasio murid-sekolah menunjukkan jumlah murid dengan sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka ini menggambarkan jumlah murid yang menjadi beban tiap sekolah. Rasio murid-sekolah SD di Kabupaten Bangkalan adalah 194, artinya bahwa rata-rata tiap SD menampung 194 orang. Terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan (SD-SLTA) maka semakin besar rata-rata ratio murid-sekolah yang ditampungnya.

Tingkat pendidikan yang semakin meningkat di berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Mutu pendidikan dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas pendidikan formal, non formal dan keagamaan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan salah satu Indikator kinerja, salah satunya siswa SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Orientasi siswa SLTA pada umumnya

akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri, dimana dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa di PTN akan bersaing dengan siswa SLTA dari luar Kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu proses penerimaan mahasiswa di PTN tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini ditunjang dengan keberadaan Universitas Trunojoyo sebagai perguruan tinggi negeri pertama di kawasan Madura berada di Kabupaten Bangkalan.

2.5. Sosial Budaya Masyarakat

2.5.1 Karakteristik Masyarakat Bangkalan

Sebagaimana golongan etnik lain di Indonesia, komunitas di Pulau Madura juga memiliki identitas etnik yang membedakan mereka dengan etnik-etnik lainnya. Ciri identitas etnik ini biasanya ditunjukkan dengan ciri yang terlihat nyata seperti bahasa, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Selain itu terdapat ciri yang tidak terlihat, berupa system nilai yang mereka anggap memiliki nilai dan menjadi acuan sebagian besar warga komunitas bersangkutan. Orang Madura memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Madura yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Hanya sebagian kecil warga komunitas yang menggunakan bahasa Indonesia, terutama pada kantor-kantor pemerintahan bahkan sebagian golongan usia tua tidak bisa berbahasa Indonesia.

Bahasa Madura terkait erat dengan bahasa Jawa, yang termasuk keluarga Bahasa Hesperonesian. Bahasa ini memiliki tingkat bahasa (*social level of speech*) sesuai dengan perbedaan status hubungan dari pemakainya. Tingkatan bahasa itu adalah bahasa ngoko, yang biasa dipakai antara sesama kawan akrab, gaya bahasa madya yang biasa dipakai dalam suasana resmi dan gaya bahasa kromo yang dipakai dalam situasi saling menghormati.

Agama yang dianut oleh mayoritas warga Madura termasuk Kabupaten Bangkalan adalah Islam. Pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha suasana sosial pulau Madura khususnya di

Kabupaten Bangkalan sangat ramai. Hal ini disebabkan karena *tradisi toron* yang masih dipegang teguh oleh orang Madura yang ada di perantauan atau kota-kota lain untuk kembali ke desa masing-masing dalam rangka merayakan hari raya tersebut.

Masyarakat Madura dikenal sebagai penganut Islam yang taat, hal ini mempengaruhi kehidupan orang Madura yaitu nilai-nilai agama Islam melandasi setiap aspek kehidupan orang Madura, termasuk orang Bangkalan. Ini sesuai dengan ungkapan orang Madura yaitu “*bhuppa’ bhabbhu’, guru, rato*” yang maksudnya dalam kehidupan orang Madura terdapat tiga komponen penting yang menjadi figur panutan yaitu ayah ibu, guru, dalam hal ini merujuk pada figur kiai atau ulama , dan yang terakhir figur pemimpin formal (birokrasi). Oleh karena itu, setiap gerak langkah orang Madura harus tetap didasarkan pada simbolisasi ketiga komponen tersebut sesuai dengan makna yang dikandungnya. Masyarakat Madura menganggap keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai pondasi bagi suatu masyarakat dengan tatanan sosial yang harmonis.

Hubungan sosial yang erat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Hubungan antar warga menciptakan struktur sosial yang menempatkan kiai dan kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. Kiai adalah pemimpin informal yang menjadi pemimpin pondok pesantren sementara kepala desa adalah pemimpin formal yang mendapat legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara pemimpin formal dan informal ini berjalan seimbang. Kepala desa melakukan tugasnya di bidang pemerintahan sementara kiai lebih banyak berkecimpung di bidang keagamaan.

Pola hubungan sosial masyarakat masih kuat yang terlihat dari kegiatan gotong-royong di daerah ini. Beberapa contoh dapat disebutkan misalnya: masyarakat secara swadaya membangun jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di wilayah perencanaan juga terdapat lembaga pendidikan (pesantren, madrasah dan sekolah) serta tempat ibadah (masjid) yang pengikutnya berasal dari daerah sekitarnya.

Dengan demikian, bentuk gotong-royong itu bukan hanya berupa tenaga tapi juga uang dan benda material lainnya misalnya bahan bangunan atau bahan makanan yang dibawa warga ketika ada hajatan berupa upacara keagamaan atau kegiatan bersama yang melibatkan banyak orang seperti hajatan (membangun rumah, menyelenggarakan perkawinan atau upacara kematian).

2.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan dasar dalam penentuan klasifikasi status pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 indikator, yaitu :

- 1) Indikator Kesehatan; yang diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0: e0*),
- 2) Indikator Pendidikan yang diwakili oleh komponen Angka Melek Huruf orang dewasa (*adult literacy rate: Lit*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*mean years school, MYS*) dan
- 3) Indikator Daya Beli (*Purchasing Power Parity, PPP*) merupakan ukuran yang sudah disesuaikan dengan kesamaan nilai daya beli.

Antara ketiga indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dengan pendidikan tinggi masyarakat cenderung mempunyai pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan sehingga diharapkan berpeluang hidup lebih lama. Begitu pula dengan pendidikan tinggi diperkirakan masyarakat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang lebih mapan dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah, sehingga kemampuan daya beli (tingkat kesejahteraan) lebih tinggi.

Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Bangkalan mencapai angka 60,51 mengalami peningkatan menjadi 61,58 pada tahun 2008. IPM tahun 2008 ini di topang oleh indeks Kesehatan sebesar 62,79, indeks pendidikan sebesar 64,70 dan indeks daya beli masyarakat sebesar 57,26.

2.5.3. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Di Kabupaten Bangkalan tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial dan kondisi sebagian masyarakat yang masih

menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas sumber daya manusia masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang masih kompetitif.

Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 97.519 RTM, dengan rincian sangat miskin sebanyak 14.050 RTM, miskin sebanyak 47.249 RTM dan hampir miskin sebanyak 36.220 RTM. Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan subordinasi yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja dan kolapnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas sumber daya manusia masyarakat yang masih tertinggal, dan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan tabel 2.15. pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2000 jumlah pengangguran yang tercatat sebesar 49.593. Akhir tahun 2006 jumlah pengangguran yang tercatat sebesar 1.034 tenaga kerja dari 567.112 orang angkatan kerja. Kemudian di tahun 2007 jumlah pengangguran tercatat sebesar 28.589 tenaga kerja dari 567.112 orang angkatan kerja. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja untuk bersaing di dalam pasar kerja.

Tabel 2.15. Daftar pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan

No	Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah Pencari krj	49.593	62.613	54.667	44.234	12.372	2.149	1.034	28.589	29.447
2	Tidak Tamat SD	9.612	12.112	452	412	31	17	3	19.200	15.774
3	Tamat SD	11.792	19.857	446	361	68	2	9	2.211	1.813
4	Tamat SLTP	5.175	6.520	3.087	2.500	319	41	45	2.315	1.911
5	Tamat SLTA	19.631	24.735	31.087	2.518	3.494	1.274	601	4.086	5.239
6	Diploma	779	981	6.441	5.217	1.768	306	160	447	1.756
7	Sarjana	2.704	3.408	13.154	10.564	6.692	509	216	380	2.954

Sumber : Bangkalan Dalam Angka (BPS) 2009

2.6. Perekonomian

Sektor perekonomian yang berkembang di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya.

2.6.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan yang berkembang di Kabupaten Bangkalan antara lain tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedelai dan kacang tanah. Produksi tanaman padi dan jagung cukup berkembang. Produksi tanaman padi di Kabupaten Bangkalan sebesar 231.632,08 Ton, produksi tanaman jagung sebesar 141.473,12 Ton, produksi tanaman ubi kayu 60.084,33 Ton, ubi jalar dengan produksi sebesar 15.234,01 Ton, kacang hijau 2.439,41 Ton, kedelai dengan produksi sebesar 2.727,53 Ton dan produksi kacang tanah sebesar 34.307,44 Ton. Selengkapnya data produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.16. di bawah ini.

Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

Kecamatan	Produksi (Ton)						
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau	Kedelai	Kacang Tanah
Kamal	9.192,40	3.348,34	479,56	42,00	0	0	362,48
Labang	4.764,04	2.279,91	2.129,08	0	0	0	610,20
Kwanyar	8.740,98	7.341,25	814,20	59,89	214,20	513,98	1.567,80
Modung	16.310,07	15.813,69	1.261,98	565,00	127,40	346,20	2.821,00
Blega	20.387,55	23.898,41	970,38	119,90	97,30	1.306,22	2.963,00
Konang	12.541,64	6.311,64	413,66	69,92	0	47,90	4.780,04
Galis	3.648,46	9.531,79	2.559,40	587,05	163,80	252,15	447,20
Tanah Merah	13.815,06	6.386,73	917,07	0	385,80	136,80	1.469,70
Tragah	8.480,19	7.095,14	2.582,78	0	0	23,18	1.439,00
Socah	14.117,77	4.959,08	1.933,60	10,70	9,78	22,70	2.500,00
Bangkalan	10.321,16	923,36	495,44	391,00	0	0	248,03
Burneh	33.552,80	6.613,77	1.355,40	4.668,30	0,65	0	1.511,10
Arosbaya	21.160,29	2.899,70	175,17	0	88,90	23,00	1.050,23
Geger	21.925,20	9.245,84	26.684,23	0	526,24	55,40	9.194,21
Kokop	6.132,35	8.612,42	8.858,83	8.372,00	242,40	0	408,90
Tanjung Bumi	7.546,62	7.082,71	3.915,68	348,25	151,80	0	284,40
Sepulu	10.425,87	8.601,60	294,73	0	108,40	0	145,95
Klamps	8.569,63	10.527,74	4.243,14	0	322,74	0	2.504,20
Jumlah	231.632,08	141.473,12	60.084,33	15.234,01	2.439,41	2.727,53	34.307,44

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.2. Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura

Sektor pertanian tanaman hortikultura yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa tanaman buah-buahan dan bunga meliputi alpukat, belimbing, durian, jambu biji, jambu air, jeruk keprok, jeruk besar, mangga, nangka, pisang, nanas, pepaya, salak, sawo, sirsak, sukun, melinjo, serta tanaman bunga melati. Selengkapnya data produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini :

Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Kw)								
		Alpukat	Belimbing	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Keprok	Jeruk Besar	Mangga	Nangka
1	Kamal	0	30,00	0	645	150,00	0	0	3.796,50	720,00
2	Labang	0	60,00	0	7.000,00	160,00	0	0	3.000,00	3.000,00
3	Kwanyar	0	0	0	981,20	81,20	76,20	144,00	15.558,00	1.847,00
4	Modung	0	1,20	0	433,00	20,00	37,50	0	12.800,00	2.170,00
5	Blega	1,00	1,80	0	300,00	265,00	87,50	0	10.700,00	580,00
6	Konang	0	2,00	0	47,00	10,00	70,00	0	400,00	240,00
7	Galis	7,50	28,70	3.985,00	4.437,30	101,70	108	3.458,80	44.000,00	11.593,00
8	Tanah Merah	0,60	111,20	350,50	800,30	21,50	1.381,00	1.209,00	2.075,20	1.510,00
9	Tragah	2,00	10,30	27,00	20,00	0	0	0	2.880,00	720,00
10	Socah	55,70	16,70	781,00	205,80	85,50	312,00	16,00	4.290,00	5.380,00
11	Bangkalan	43,70	12,00	0,60	313,40	110,90	37,10	219,00	6.067,00	245,00
12	Burneh	4,00	16,00	3.300,00	602,00	20,00	21,00	4,00	3.760,00	5.712,00
13	Arosbaya	0	3,00	14,00	159,00	20,00	30,00	0	2.517,00	262,00
14	Geger	14,00	2,80	3.524,00	232,00	24,80	1.050,00	731,50	56.263,00	1.316,00
15	Kokop	24,00	5,20	350,00	270,00	28,50	28,00	0	12.946,00	96,00
16	Tanjung Bumi	0	0	0	40	23,00	150,00	4,00	6.036,00	86,00
17	Sepulu	0	0	0	283,10	2,30	194,60	0	24.380,00	2.187,60
18	Klampis	0	3,80	0	337,00	12,00	57,60	705,00	22.393,40	1.209,00
Jumlah		152,50	304,70	12.332,10	17.106,10	1.136,40	3.640,50	3.640,50	233.862,10	38.873,60

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Kw)								
		Nanas	Pepaya	Salak	Sawo	Sirsak	Pisang	Sukun	Melinjo	Melati
1	Kamal	0	52,50	60,00	36,20	0	694,00	129,00	0	0
2	Labang	0	1.032,00	0	100,00	52,00	2.170,00	33,00	10,00	0

3	Kwanyar	0	6,20	0	435,00	17,70	2.892,80	300,00	0	0
4	Modung	0	33,20	1,00	410,00	0	6.000,00	50,00	0	0
5	Blega	2,00	233,20	0	360,00	40,00	2.165,40	10,00	1,00	0
6	Konang	0	575,00	0	0	0	4.540,00	3,00	0	0
7	Galis	100,10	993,10	357,00	524,50	53,00	3.135,20	0	60,00	0
8	Tanah Merah	51,80	96,20	13,90	471	248,30	394,00	19,30	10,00	0
9	Tragah	2,00	75,50	3,00	0	7,00	319,70	7,50	4,00	0
10	Socah	117,90	1.497,80	1.851,80	236,30	49,90	2.575,80	500,00	320,00	0
11	Bangkalan	2,90	325,90	5.018,00	286,00	0	1.395,90	0	3.085,00	0
12	Burneh	66,00	271,70	3,00	40,40	4,00	3.024,00	74,20	6.989,00	106.347,00
13	Arosbaya	5,20	87,00	3,50	2,00	24,00	326,00	213,00	26,00	0
14	Geger	11,80	124,90	327,00	11,00	563,90	24.891,00	0	454,00	0
15	Kokop	9,80	102,90	9,90	150,00	283,50	11.110,70	115,00	0	0
16	Tanjung Bumi	0	97,00	0	12,50	0	2.680,00	0	0	0
17	Sepulu	0	1.136,30	13,60	179,00	213,40	1.294,20	0	0	0
18	Klampus	0	62,00	0	1.156,00	7,80	1.169,30	110	4,20	0
Jumlah		369,50	6.802,40	7.661,70	4.409,60	1.564,50	70.778,00	1.564,00	10.963,20	106.347,00

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.3. Sektor Tanaman Perkebunan

Pada sektor perkebunan, jenis tanaman yang berkembang di Kabupaten Bangkalan adalah kelapa, kapuk randu, jambu mete, siwalan, cabe jamu, Pinang dan Cengkeh. Namun dari sekian jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bangkalan tersebut yang cukup produktif adalah kelapa, kapuk randu, jambu mete, siwalan dan cabe jamu karena memiliki hasil produksi yang sangat potensial. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.18. berikut :

Tabel 2.18. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Produksi (Ton)						
		Kelapa	Kapuk Randu	Jambu Mete	Siwalan	Cabe Jamu	Pinang	Cengkeh
1	Kamal	23,91	3,08	3,76	3,18	0	6,16	0
2	Labang	42,95	12,72	71,42	0	0	0	0
3	Kwanyar	207,94	476,55	86,42	0	0	0	0
4	Modung	49,35	16,64	6,66	0	0	0	0
5	Blega	102,39	32,24	47,50	46,90	3,91	0	0
6	Konang	278,04	202,82	76,38	31,47	0	0	0,10
7	Galis	509,85	633,98	23,12	0	0,89	0	0
8	Tanah Merah	391,23	419,17	58,52	0	3,03	0	0
9	Tragah	75,68	11,87	52,67	0	0,25	0	0
10	Socah	424,63	53,56	91,30	4,51	0	0	0
11	Bangkalan	582,15	13,33	23,23	42,67	3,07	0,17	0
12	Burneh	180,44	16,03	18,09	0	0,52	11,45	0
13	Arosbaya	86,67	39,44	32,38	10,78	0	0	0
14	Geger	333,68	32,67	469,38	0	0	0	0,27
15	Kokop	336,19	36,71	451,21	49,96	10,25	0	0,07
16	Tanjung Bumi	242,65	41,80	252,12	0	45,73	0	0
17	Sepulu	132,06	28,10	122,67	25,07	0,24	0	0
18	Klampus	149,82	29,47	79,90	0	1,10	6,29	0
Jumlah		4.149,63	2.100,18	1.966,73	214,54	68,99	24,07	0,44

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.4. Sektor Peternakan

Jenis ternak yang berkembang di Kabupaten Bangkalan meliputi ternak besar dan kecil serta ternak unggas. Untuk ternak besar dan kecil meliputi kuda, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sedangkan jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam ras dan itik. Data selengkapnya populasi ternak di Kabupaten Bangkalan lihat pada tabel 2.19. dan tabel 2.20. berikut :

Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)					
		Kuda	Sapi	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Domba
1	Kamal	25	2.773	0	23	3.472	799
2	Labang	25	4.097	0	0	4.174	802
3	Kwanyar	29	3.860	0	0	2.622	86
4	Modung	24	6.569	0	0	3.052	478
5	Blega	19	9.861	0	0	2.526	300
6	Konang	10	4.662	0	0	901	0
7	Galis	78	14.074	0	0	7.314	7
8	Tanah Merah	55	8.421	0	0	5.224	156
9	Tragah	5	4.844	0	0	3.877	25
10	Socah	232	5.057	0	0	3.507	276
11	Bangkalan	9	2.808	0	561	1.407	79
12	Burneh	89	3.820	21	1.137	1.203	16
13	Arosbaya	27	4.269	0	59	1.498	42
14	Geger	36	16.362	0	0	2.530	13
15	Kokop	0	10.499	0	0	1.771	520
16	Tanjung Bumi	34	5.182	0	0	1.632	57
17	Sepulu	5	9.365	0	0	1.009	0
18	Klamps	11	4.672	0	0	2.089	17
Jumlah		713	121.195	21	1.780	49.808	3.673

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Tabel 2.20. Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)			
		Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Itik Manila
1	Kamal	29.400	0	1.255	830
2	Labang	6.485	0	2.070	810
3	Kwanyar	16.382	1.500	1.960	841
4	Modung	36.256	2.819	2.495	997
5	Blega	39.569	0	3.836	2.164
6	Konang	18.958	0	1.565	219
7	Galis	49.025	0	1.513	150
8	Tanah Merah	136.752	730	5.967	1.613
9	Tragah	61.150	0	5.890	2.666
10	Socah	19.520	0	3.750	1.475
11	Bangkalan	112.192	15.878	6.730	1.163
12	Burneh	34.718	5.900	8.206	1.836
13	Arosbaya	4.500	500	4.436	1.612
14	Geger	26.648	0	7.395	5.520
15	Kokop	43.670	0	0	3.591
16	Tanjung Bumi	37.157	10.448	421	966
17	Sepulu	1.282	20.000	115	1.444
18	Klamps	14.276	1.000	692	0
Jumlah		687.940	58.775	58.296	27.897

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.5. Sektor Perikanan

Sektor perikanan yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa perikanan laut dan budidaya perikanan meliputi perairan umum, tambak, sawah tambak dan kolam. Perikanan laut banyak diusahakan oleh masyarakat yang bermukim disepanjang perairan Selat Madura maupun Laut Jawa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Nilai produksi perikanan menurut sub sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan terlihat pada tabel 2.21. dibawah ini.

Tabel 2.21. Nilai Produksi Perikanan (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Budidaya			
			Perairan Umum	Tambak	Sawah	Kolam
1	Kamal	2.207,17	0	4.083,02	0	19,37
2	Labang	13.197,40	0	359,79	0	0
3	Kwanyar	24.278,89	9,04	155,64	0	0
4	Modung	0	13,60	5.485,80	0	0
5	Blega	0	99,56	0	0	0
6	Konang	0	0	0	0	0
7	Galis	0	0	0	0	0
8	Tanah Merah	0	0	0	0	0
9	Tragah	0	0	0	0	0
10	Socah	15.396,69	0	5.774,84	0	0
11	Bangkalan	26.394,80	140,31	2.716,62	102,52	8,13
12	Burneh	0	55,58	0	0	26,15
13	Arosbaya	17.698,25	0	3.031,94	0	0
14	Geger	0	2,24	0	0	6,78
15	Kokop	0	3,36	0	0	0
16	Tanjung Bumi	50.764,96	31,70	4.123,44	0	0
17	Sepulu	30.793,93	12,13	622,55	0	0
18	Klampis	39.729,10	77,08	649,37	0	0
Jumlah		220.461,24	444,64	28.003,04	102,52	60,43

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Dari keseluruhan sektor pertanian dalam arti luas diperoleh indeks Nilai Tukar Petani (INTP) Bangkalan tahun 2006 rata-rata 105,07 mengalami pertumbuhan sebesar 2,02 persen dari tahun 2005. Indeks Nilai Tukar Petani (INTP) Bangkalan tahun 2005 sendiri sebesar 102,99. Kenaikan Indeks Nilai Tukar Petani Bangkalan disebabkan karena kenaikan Indeks Harga yang diterima petani lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang dibayar Petani dari tahun 2005 ke tahun 2006. Secara umum keadaan diatas dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Bangkalan

tahun 2006 lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana pada tabel 2.22 berikut ini :

Tabel 2.22. Indeks Harga Yang Diterima Petani, Indeks Harga Yang Dibayar Petani dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2006

NO	INDEKS PER SEKTOR, KELOMPOK DAN SUB KELOMPOK	TAHUN		Perubahan 2005-2006
		2005	2006	
1	2	3	4	5
1.	Indeks Harga yang diterima Petani	121,05	140,50	16,07
1.1.	Indeks Tanaman Bahan Makanan	123,11	143,67	16,70
1.2.	Indeks Tanaman Perkebunan Rakyat	105,83	106,09	0,24
1.3.	Indeks Peternakan	105,60	118,01	11,75
1.4.	Indeks Perikanan	104,83	115,26	9,94
2.	Indeks Harga yang dibayar Petani	117,54	133,72	13,76
2.1.	Indeks Konsumsi Rumah Tangga	115,40	134,18	16,28
2.2.	Indeks Biaya produksi dan Penambahan Barang Modal	119,29	133,38	11,81
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,99	105,07	2,02

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

Kenaikan Indeks Harga yang diterima petani Bangkalan terutama disebabkan oleh naiknya sub. Sektor tanaman bahan makanan sebesar 16,70 persen antara tahun 2005 ke tahun 2006. Kenaikan yang dominan berikutnya adalah sub. Sektor peternakan yaitu sebesar 11,75 persen. Sedangkan kenaikan Indeks Harga yang dibayar Petani disebabkan naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 16,28 persen.

2.6.6. Sektor Industri

Sektor industri yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa industri kecil, industri rumah tangga, industri sedang dan menengah. Jumlah industri yang ada dari tahun ke tahun meningkat terutama untuk industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Jumlah industri yang ada seperti yang tertera pada tabel 2.23. berikut ini.

Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2008

No	Uraian	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Industri Besar Sedang				
	a. Jumlah Perusahaan	45	60	60	62
	b. Jumlah Tenaga Kerja	1.084	1.230	1.230	1.247
2	Industri Kecil				
	a. Jumlah Perusahaan	419	435	458	458
	b. Jumlah Tenaga Kerja	3.505	3.620	3.735	3.784
3	Industri Kerajinan Rumah Tangga				
	a. Jumlah Perusahaan	16.511	16.511	16.511	16.514
	b. Jumlah Tenaga Kerja	24.470	24.470	24.470	24.495
Jumlah					

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.7. Sektor Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Bangkalan digolongkan pada mineral bukan logam dan batuan, tambang ini pada umumnya dieksplorasi oleh masyarakat. Pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan cenderung di eksploitasi secara tak terkendali, sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan disekitar tambang menjadi lahan kritis, rawan longsor maupun perubahan ekosistem disekitarnya. Sehingga perlu pengendalian terhadap penambangan yang tidak terkontrol tersebut.

Selain itu Kabupaten Bangkalan memiliki potensi migas yang tersebar di Kecamatan Konang, Sepulu, Geger dan Blega.

2.6.8. Sistem Utilitas

2.6.8.1. Air Bersih

Kebutuhan air bersih sudah terlayani jaringan air bersih perpipaan. Jumlah Rumah tangga yang telah menggunakan PDAM di Kabupaten Bangkalan sebanyak 13.173 pelanggan. Selain menggunakan PDAM masih banyak juga masyarakat yang memanfaatkan air sumur/pompa. Selain itu memanfaatkan sumber mata air masih dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24. berikut ini :

Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Produksi Air Minum Kabupaten Bangkalan Tahun 2006-2008

No	Uraian	2006	2007	2008
1	Air Minum			
	- Diproduksi	4.792.543	4.906.500	5.151.825
	- Disalurkan	-	-	-
	- Terjual	2.811.296	2.959.550	3.019.264
2	Jumlah Pelanggan	11.965	12.685	13.173
3	Cakupan Pelayanan terhadap penduduk (%)	12,94	18,65	12,96
4	Nilai Penjualan (Rp)	5.344.179,00	6.402.369,00	8.432.775,00

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.8.2. Persampahan

Pengelolaan persampahan Kabupaten Bangkalan dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup serta dibantu oleh masyarakat. Sistem persampahan di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1) Sumber Sampah

Sumber sampah di Kabupaten Bangkalan berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar/perdagangan dan jasa, perkantoran dan industri. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, industri, perdagangan, jasa dan lainnya tersebut dikumpulkan di setiap TPS untuk kemudian dikirim ke TPA.

2) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan, melalui proses sebagai berikut :

- Proses pengumpulan sampah dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang di sediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan perkantoran;
- Proses pengangkutan sampah dilakukan dari bak-bak penampungan ke TPS atau Transfer Depo, selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck/dump truck menuju TPA Buluh;
- Pada sebagian wilayah yang belum terdapat sistem pengelolaan sampah secara terpadu masih dibuang secara tradisional dengan cara menimbun/ditanam, dibakar maupun dibuang secara langsung ke sungai-sungai maupun laut.

Sebagian wilayah yang belum terlayani oleh Badan Lingkungan Hidup, masyarakatnya masih membuang sampah secara langsung ke sungai, laut ataupun saluran drainase, tanpa menimbun ataupun membakarnya, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Akibatnya sungai menjadi kotor dan tersumbat .

2.6.9 Sektor Pariwisata

Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu :

1) Wisata Alam

- Pantai Siring Kemuning (Kecamatan Tanjung Bumi), Maneron (Kecamatan Sepulu) dan Pantai Rongkang (Kecamatan Kwanyar);
- Wana Wisata di Kecamatan Geger;

2) Wisata Budaya

- Karapan sapi;
- Mercusuar Peninggalan Belanda di Kecamatan Socah;
- Museum Cakraningrat di Jl. Soekarno – Hatta Bangkalan.

3) Wisata Religi

- Pasarean K. Moh. Kholil di Desa Mertajasah Kecamatan Bangkalan;
- Pasarean Aer Mata di Desa Buduran Kecamatan Arosbaya.

4) Wisata Minat Khusus

- Sentra Kerajinan batik tulis di Desa Tlaga Biru dan Paseseh di Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Lembung Gunong dan Desa Dupok di Kecamatan Kokop, Desa Bates di Kecamatan Blega, Desa Dak Iring di Kecamatan Socah;
- Galangan kapal tradisional di Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Sepulu.

Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan hendaknya dikelola menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung terutama wisatawan nusantara, misalnya melalui kegiatan pagelaran kerapan sapi.

Untuk lebih mengoptimalkan pengembangan obyek wisata yang terdapat di Bangkalan, perlu dilengkapi dengan beberapa fasilitas infrastruktur misalnya hotel, losmen maupun mess.

2.6.10. Transportasi

Jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier terutama untuk jalan utama. Berdasarkan fungsi jalan, maka jalan-jalan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan termasuk ke dalam:

- Jalan Arteri, ruas jalan ini merupakan bagian dari jalan yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dengan Surabaya dan sekitarnya;
- Jalan Kolektor;
- Jalan Lokal.

Panjang jalan Kabupaten Bangkalan sekitar 721.365 Km. Jenis prasarana jalan yang terdapat di wilayah perencanaan berupa jalan aspal, jalan makadam dan jalan tanah. Untuk jalan aspal terdapat pada ruas-ruas jalan utama kecamatan, sedangkan jalan tanah dan makadam masih banyak terdapat pada jalan desa dan jalan lingkungan.

Tabel 2.25. Daftar Panjang Jalan Kabupaten Bangkalan Tahun 2008

No	Jenis	Panjang Jalan (Km)
1	Jenis Permukaan	
	a. Aspal	651.965
	b. Kerikil	69.400
2	Kondisi Jalan	
	a. Baik	355.300
	b. Sedang	180.400
	c. Rusak Ringan	107.415
	d. Rusak Berat	78.250
3	Kelas Jalan	
	a. Kelas II	52.730
	b. Kelas III	180.235
	c. Kelas IIIA	419.000
	d. Kelas IV	69.400

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

Koridor Surabaya-Madura saat ini telah dilayani oleh Jembatan Suramadu selain dilayani oleh layanan transportasi Penyeberangan Ujung-Kamal. Jembatan Suramadu menjadi koneksi Arteri Primer Jaringan

Pulau Jawa dengan jaringan Pulau Madura. Jembatan Suramadu juga berfungsi sebagai konektor antara jaringan jalan tol Surabaya dengan jaringan arteri primer dan jaringan jalan tol pada masa depan. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura - Surabaya terletak di Kecamatan Labang. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi akses yang menunjang perkembangan di Pulau Madura secara keseluruhan.

Sarana angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dilayani oleh jenis angkutan MPU, Bus dan mobil barang. Jalur atau rute angkutan umum yang ada berupa angkutan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan angkutan bus melayani jalur antar kota di Pulau Madura - Surabaya. Data jumlah angkutan darat di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel 2.26. berikut ini.

Tabel 2.26. Jumlah Angkutan Darat Kabupaten Bangkalan Tahun 2006-2008

No	Jenis Angkutan	2006	2007	2008
1	MPU	1.125	1.158	924
2	Bis Umum	372	382	182
3	Bis Bukan Umum	77	84	42
4	Mobil Barang Umum	531	538	571
5	Mobil Barang Bukan Umum	2.252	2.338	2.734

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2009

2.6.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan sektor perekonomian Kabupaten Bangkalan dengan melihat pertumbuhan/kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam satu tahun. PDRB di Kabupaten Bangkalan terjadi peningkatan setiap tahun ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Tabel 2.27. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

NO.	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN	1.266.653,37	1.431.077,16	1.551.851,13	1.634.620,19	1.972.363,99
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	896.568,28	1.019.650,07	1.120.848,24	1.182.168,06	1.432.303,28
	1.2. Tanaman Perkebunan	59.862,89	68.710,62	75.182,12	81.822,30	86.275,44
	1.3. Peternakan	172.003,42	187.672,93	206.646,66	238.729,88	236.218,09
	1.4. Kehutanan	54.317,13	61.822,59	68.610,71	71.065,18	82.095,65
	1.5. Perikanan	83.801,64	93.220,95	100.563,40	111.834,76	135.471,54
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	48.917,62	62.834,97	74.746,78	87.674,19	98.831,63
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	6.708,88	6.791,41	6.799,55	14.410,31	28.478,32
	2.2. Pertambangan bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3. Penggalian	42.208,64	56.043,57	67.947,22	73.263,87	70.353,31
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	148.645,49	179.402,19	203.962,09	226.781,34	245.660,77
	3.1. Industri Migas					
	a. Penggalian minyak bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. gas alam cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Industri Tanpa Migas					
	a. Industri Makanan, Minuman & Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Tekstil, Barang kulit dan alas kaki	148.645,49	179.402,19	202.562,09	223.581,34	245.660,77
	c. Barang Kayu & hasil hutan lainnya	89.888,84	110.975,24	124.834,91	138.820,76	149.754,18
	d. Industri Kertas, dan barang cetakan	17.005,49	19.257,02	21.971,71	23.407,96	24.956,90
	e. Pupuk Kimia & barang dari Karet	11.399,57	13.745,23	16.252,36	17.654,12	19.675,54
	f. Semen & Barang Galian bukan Logam	20.130,59	23.254,96	26.482,79	29.216,16	33.404,53
	g. Logam Dasar, Besi & Baja	4.910,50	5.722,71	6.708,73	7.408,17	8.190,50
	h. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	3.475,81	4.120,23	4.912,96	5.624,79	6.106,48
	i. Barang lainnya	569,61	679,20	803,09	919,29	1.060,99
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	45.152,59	59.589,73	73.107,24	76.583,95	79.742,78
	4.1. Listrik	43.048,93	57.095,80	70.364,87	73.452,92	75.686,11
	4.2. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3. Air Bersih	2.103,67	2.493,93	2.742,37	3.131,04	4.056,67
5	BANGUNAN	183.446,29	241.404,65	291.991,36	360.985,09	433.236,20
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	839.964,58	1.013.895,53	1.112.620,29	1.338.770,35	1.633.924,54
	6.1. Perdagang. Besar & Eceran	823.153,34	993.841,36	1.090.025,46	1.314.570,70	1.505.789,34
	6.2. Hotel	997,22	1.189,09	1.301,81	1.405,29	1.450,17
	6.3. Restoran	15.814,03	18.865,08	21.293,02	22.794,35	26.685,03
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	281.204,82	355.593,38	413.947,61	462.375,23	517.686,92
	a. Pengangkutan	261.277,15	330.658,15	384.219,63	417.969,39	481.170,16
	1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Angkutan Jalan Raya	216.416,32	266.497,76	307.112,02	332.698,59	381.895,62
	3. Angkutan Laut	24.235,41	30.998,56	36.932,87	42.235,60	47.909,02
	4. Angk Sungai, Danau dan Penyeberangan	19.950,69	32.351,13	39.284,67	42.067,02	50.241,57
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Jasa Penunjang Angkutan

NO.	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
	6. Jasa Penunjang Angkutan	674,74	810,70	890,07	958,18	1.123,94
	b. Komunikasi	19.927,67	24.935,22	29.727,98	34.415,84	36.416,77
	1. Pos dan Telekomunikasi	17.683,60	22.141,15	26.463,10	30.907,67	32.680,55
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	2.244,07	2.794,08	3.264,88	3.508,17	3.736,21
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	167.676,10	202.071,34	234.937,49	263.787,79	285.981,88
	8.1. Bank	26.305,49	31.940,35	36.401,88	42.524,99	47.254,18
	8.2. Lembaga Keu. tanpa Bank	21.763,46	26.334,52	29.848,46	34.526,12	39.192,31
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.3. Sewa Bangunan	91.268,01	108.025,99	125.569,41	138.071,12	147.039,94
	8.5. Jasa Perusahaan	28.239,14	35.770,48	43.117,74	48.665,56	52.495,45
9	JASA – JASA	523.071,80	621.453,99	708.695,09	814.345,08	899.458,98
	a. Pemerintahan Umum	323.422,50	362.941,48	409.683,57	463.086,10	533.575,52
	1. Adm. Pemerintah dan Pertahanan	323.422,50	362.941,48	409.683,57	463.086,10	533.575,52
	2. Jasa Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Swasta	199.649,30	258.512,51	310.911,52	351.268,98	365.883,46
	1. Sosial Kemasyarakatan	37.009,91	44.166,09	49.311,44	54.509,55	58.243,35
	2. Hiburan dan Rekreasi	308,72	393,99	498,55	569,30	595,03
	3. Perorangan & Rumah Tangga	162.330,67	213.952,43	260.801,53	296.180,12	307.045,08
	JUMLAH PDRB	3.504.532,56	4.167.322,94	4.734.759,07	5.314.923,21	6.066.686,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

Data di atas memberikan informasi bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 3.504.532.560.000 pada tahun 2004, menjadi sebesar Rp. 4.167.322.940.000,- pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 juga terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 4.734.759.070.000, begitu juga terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 5.314.923.210.000 pada tahun 2007. Adapun pada tahun 2008, PDRB Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar Rp. 6.066.686.690.000.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 1995 masih sebesar Rp. 792.993.757.000 atau mengalami peningkatan sebesar 765 % apabila dibandingkan dengan tahun 2008.

Selanjutnya, berikut dapat dikemukakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam bentuk tabel 2.28. di bawah ini.

Tabel 2.28.

Tabel 2.28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK) Kabupaten Bangkalan Tahun 2004-2008 (000.000)

NO.	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN	979.404,81	999.603,94	1.023.012,84	1.033.248,54	1.108.719,27
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	717.025,18	733.086,54	751.706,94	746.593,05	834.795,54
	1.2. Tanaman Perkebunan	45.659,50	46.280,47	46.692,36	48.856,56	48.918,01
	1.3. Peternakan & hasil-hasilnya	108.386,25	108.776,44	110.092,64	119.566,50	105.981,84
	1.4. Kehutanan	45.962,91	47.530,24	48.832,57	48.945,54	59.011,37
	1.6. Perikanan	62.370,97	63.930,25	65.688,33	69.256,89	70.012,50
2	PERTAMBANGAN& PENGGALIAN	37.093,24	41.949,75	45.661,13	50.917,45	51.564,03
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	5.456,61	4.779,88	4.313,36	8.209,34	12.605,69
	2.2. Pertambangan tanpa Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	2.3. Penggalian	31.636,63	37.169,88	41.347,77	42.708,11	38.958,34
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	105.309,73	110.621,55	115.715,46	118.701,93	120.153,89
	3.1. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	a. Pengilangan minyak bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	b. gas alam cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	3.2. Industri Tanpa Migas	105.309,73	110.621,55	115.715,46	118.701,93	120.153,89
	a. akanan,Minuman dan Tembakau	62.156,55	65.368,93	68.153,65	69.850,18	70.646,47
	b. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	12.008,64	12.555,03	13.043,42	13.552,11	13.712,03
	c. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	7.345,60	7.725,32	8.078,37	8.062,21	8.083,98
	d. Kertas dan Barang Cetakan	16.792,97	17.597,35	18.646,15	19.266,78	19.659,83
	e. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	3.226,88	3.337,33	3.477,83	3.499,73	3.545,93
	f. Semen dan Barang Galian Bukan Logam	2.484,46	2.635,08	2.822,43	2.929,31	2.958,02
	g. Logam Dasar Besi dan Baja	403,20	422,50	437,54	454,21	455,85
	h. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan	428,39	477,73	505,80	514,80	515,38
	i. Barang lainnya	463,05	502,29	550,21	572,59	576,42
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	18.503,96	21.156,87	23.651,98	24.339,70	24.638,89
	4.1.Listrik	16.968,44	19.549,34	21.944,13	22.427,20	22.653,72
	4.2. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	4.3. Air Bersih	1.535,52	1.607,53	1.707,84	1.912,50	1.985,17
5	BANGUNAN	123.300,37	141.220,38	161.744,82	189.241,44	196.848,95
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	636.499,82	667.607,62	690.004,78	745.955,29	782.939,38
	6.1.Perdagangan Besar & Eceran	623.012,97	653.643,75	675.292,88	730.391,91	767.130,62
	6.2. Hotel	821,83	873,11	935,19	970,28	979,13
	6.3. Restoran	12.665,02	13.090,76	13.776,71	14.593,10	14.829,63

NO.	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
7	PENGANGKUTAN&KOMUNIKASI	191.785,90	206.032,75	221.194,43	230.304,40	235.713,46
	a. Pengangkutan	177.822,88	190.431,78	203.033,54	209.519,78	213.849,47
	1. Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	2. Angkutan Jalan Raya	148.362,69	153.955,96	161.484,40	165.828,84	169.200,35
	3. Angkutan Laut	15.253,70	17.473,05	19.082,32	20.530,26	21.105,33
	4. ASDP	13.678,91	18.447,36	21.871,18	22.531,93	22.902,46
	5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	6. Jasa Penunjang Angkutan	527,58	555,42	595,63	628,76	641,33
	b. Komunikasi	13.963,02	15.600,97	18.160,89	20.784,61	21.864,00
	1. Pos dan Telekomunikasi	12.257,54	13.797,08	16.274,75	18.841,32	19.822,95
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	1.705,48	1.803,89	1.886,14	1.943,29	2.041,04
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	122.754,30	131.795,14	141.569,22	148.376,30	151.182,09
	8.1. Bank	19.347,89	20.470,65	21.676,37	23.641,70	24.223,29
	8.2. Lembaga Keuangan non Bank	15.745,71	16.977,02	18.087,32	19.577,53	20.341,24
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	8.4. Sewa Bangunan	68.395,49	73.354,17	78.899,75	80.864,57	81.834,95
	8.5. Jasa Perusahaan	19.265,21	20.993,30	22.905,79	24.292,51	24.783,00
9	JASA – JASA	360.477,02	377.584,24	404.594,08	428.110,83	441.570,65
	a. Pemerintahan Umum	203.628,92	205.889,20	213.989,27	225.678,19	236.713,86
	1. Adm. Pemerintah Pertahanan	203.628,92	205.889,20	213.989,27	225.678,19	236.713,86
	2. Jasa Pemerintah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	b. Swasta	156.848,10	171.695,04	190.600,81	202.432,63	204.856,78
	1. Sosial Kemasyarakatan	30.185,25	30.989,18	32.712,18	34.272,55	34.793,49
	2. Hiburan dan Rekreasi	254,29	287,02	324,65	357,53	364,58
	3. Perorangan & Rumah Tangga	126.408,57	140.418,85	157.563,99	167.802,55	169.698,72
	JUMLAH PDRB	2.575.129,14	2.697.572,26	2.827.144,75	2.969.195,88	3.113.331,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

Data PDRB sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, memberikan informasi bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangkalan, mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 2.575.129.140.000 pada tahun 2004, menjadi sebesar Rp. 2.697.572.260.000 pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 juga terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.827.144.750.000, dan berubah menjadi sebesar

Rp. 2.969.195.880.000

Rp. 2.969.195.880.000 pada tahun 2007 serta meningkat menjadi sebesar Rp. 3.113.331.210.000 pada tahun 2008.

Sedangkan PDRB Atas Harga Konstan 1993, pada tahun 1995 masih sebesar Rp. 672.180.558.000 atau mengalami peningkatan sebesar 463 % apabila dibandingkan dengan tahun 2008.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun berdasarkan tabel 2.29., diketahui terjadi perkembangan positif sejak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, hal ini ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Berdasarkan angka PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 sebesar 4,56 %, dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2005 menjadi sebesar 4,75 % dan pada tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 4,80%, tahun 2007 menjadi sebesar 5,02 %. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 4,85%.

Tabel 2.29. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2004-2008

NO.	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN	102,87	102,06	102,34	101,00	107,30
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	102,40	102,24	102,54	99,32	111,81
	1.2. Tanaman Perkebunan	102,31	101,36	100,89	104,64	100,13
	1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	103,94	100,36	101,21	108,61	88,64
	1.4. Kehutanan	106,43	103,41	102,74	100,23	100,13
	1.5. Perikanan	104,36	102,50	102,75	105,48	101,05
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	108,71	113,09	108,85	111,51	101,27
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	104,34	87,60	90,24	190,32	153,55
	2.2. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3. Penggalian	109,50	117,49	111,24	103,29	91,22
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	106,16	105,04	104,60	102,58	101,22
	3.1 Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Pengilangan minyak bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. gas alam cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Industri Tanpa Migas	106,16	105,04	104,60	102,58	101,22
	a. Makanan, Minuman & Tembakau	106,49	105,17	104,26	102,49	101,14
	b. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	109,50	104,55	103,89	103,90	101,18
	c. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	103,41	105,17	104,57	99,80	100,27
	d. Kertas dan Barang Percetakan	103,24	104,79	105,96	103,33	102,04

e. Pupuk, kimia dan barang dari karet

	e. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	107,18	103,42	104,21	100,63	101,32
	f. Semen dan Barang Galian Non Logam	110,20	106,06	107,11	103,79	100,98
	g. Logam Dasar Besi dan Baja	106,67	104,79	103,56	103,81	100,36
	h. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	103,13	111,52	105,89	101,77	100,11
	i. Barang lainnya	105,35	108,47	109,54	104,07	100,67
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	106,95	114,34	111,79	102,91	101,23
	4.1. Listrik	106,87	115,21	112,25	102,20	101,01
	4.2. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3. Air Bersih	107,85	104,69	106,24	111,98	103,80
5	BANGUNAN	111,59	114,53	115,34	117,00	104,02
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	103,35	104,89	103,35	108,11	104,96
	6.1. Perdagangan Besar dan Eceran	103,35	104,89	103,35	108,16	105,03
	6.2. Hotel	105,17	106,24	107,11	103,75	100,91
	6.3. Restoran	106,93	103,36	105,24	105,93	101,62
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	106,99	107,43	107,36	104,12	102,35
	a. Pengangkutan	106,69	107,09	106,62	103,19	102,07
	1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Angkutan Jalan Raya	106,17	103,77	104,89	102,69	102,03
	3. Angkutan Laut	115,56	114,55	109,21	107,59	102,80
	4. Angk. Sungai, Danau dan Penyeberangan	103,85	134,86	118,56	103,02	101,64
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jasa Penunjang Angkutan	95,17	105,28	107,24	105,56	102,00
	b. Komunikasi	110,94	111,73	116,41	114,45	105,19
	1. Pos dan Telekomunikasi	111,02	112,56	117,96	115,77	105,21
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	110,40	105,77	104,56	103,03	105,03
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	108,42	107,36	107,42	104,81	101,89
	8.1. Bank	113,02	105,80	105,89	109,07	102,46
	8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	107,08	107,82	106,54	108,24	103,90
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.4. Sewa Bangunan	107,48	107,25	107,56	102,49	101,20
	8.5. Jasa Perusahaan	108,47	108,97	109,11	106,05	102,02
9	JASA – JASA	105,61	104,75	107,15	105,81	103,14
	a. Pemerintahan Umum	102,26	101,11	103,93	105,46	104,89
	1. Adm. Pemerintah dan Pertahanan	102,26	101,11	103,93	105,46	104,89
	2. Jasa Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Swasta	110,31	109,47	111,01	106,21	101,20
	1. Sosial Kemasyarakatan	103,57	102,66	105,56	104,77	101,52
	2. Hiburan dan Rekreasi	104,04	112,87	113,11	110,13	101,97
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	112,06	111,08	112,21	106,50	101,13
	JUMLAH PDRB	104,56	104,75	104,80	105,02	104,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

Memasuki gambaran tentang inflasi PDRB di Kabupaten Bangkalan, berikut dapat dikemukakan kecenderungan dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dalam bentuk tabel 3.30. di bawah ini :

Tabel 2.30.

Tabel 2.30. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 - 2008 (Prosen)

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN	4,84	10,71	7,32	6,18	9,05
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	4,43	11,24	7,20	6,19	8,36
	1.2. Tanaman Perkebunan	5,08	13,24	8,45	4,01	5,31
	1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	6,00	8,72	8,79	6,37	11,63
	1.4. Kehutanan	4,78	10,06	8,02	3,34	15,37
	1.5. Perikanan	6,42	8,53	4,99	5,43	19,88
2	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	5,59	13,58	9,29	5,19	9,31
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	8,83	15,56	10,95,	11,35	28,70
	2.2. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3. Penggalan	5,01	13,01	8,99	4,39	5,27
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,24	14,90	8,69	7,91	7,45
	3.1 Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Pengilangan minyak bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. gas alam cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Industri Tanpa Migas	4,24	14,90	8,69	7,91	7,45
	a. Makanan,Minuman dan Tembakau	3,16	17,39	7,89	8,50	6,66
	b. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	6,54	8,31	9,82	4,73	3,17
	c. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	6,24	14,65	13,07	8,84	11,15
	d. Kertas dan Barang Percetakan	5,32	10,24	7,47	6,77	12,05
	e. Pupuk,Kimia dan Barang dari Karet	3,24	12,68	12,49	9,74	9,12
	f. Semen dan Barang Galian bukan Logam	7,24	11,76	11,32	10,31	7,51
	g. Logam Dasar Besi dan Baja	4,98	13,79	14,18	10,27	15,00
	h. Alat Angkutan,Mesin dan Peralatannya	6,25	18,58	14,88	9,85	10,25
	i. Barang lainnya	5,25	18,23	10,07	7,35	5,12
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	4,50	15,43	9,74	1,80	2,86
	4.1. Listrik	4,21	15,12	9,79	2,14	2,01
	4.2. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3. Air Bersih	11,73	13,24	3,50	1,96	24,82
5	BANGUNAN	5,70	14,90	8,14	5,67	12,57
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,54	15,08	9,04	8,38	9,16
	6.1. Perdagangan Besar dan Eceran	6,58	15,08	9,08	8,42	9,16
	6.2. Hotel	4,01	12,24	2,21	4,05	2,26
	6.3. Restoran	5,06	15,41	7,25	6,38	9,44
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9,04	17,71	8,40	4,96	11,79
	a.Pengangkutan	9,24	18,18	8,99	5,41	12,79
	1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Angkutan Jalan Raya	9,45	18,67	9,87	5,49	12,50
	3. Angkutan Laut	8,35	11,66	9,10	6,29	10,34

4. Angk sungai, danau dan penyeb.

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	4. Angk Sungai, Danau dan Penyebr.	7,24	20,24	2,42	3,94	17,50
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jasa Penunjang Angkutan	4,65	14,13	2,38	1,98	15,00
	b. Komunikasi	6,48	11,99	2,42	1,16	0,9
	1. Pos dan Telekomunikasi	6,54	11,24	1,32	0,89	0,50
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	5,98	17,72	11,75	4,29	1,40
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	6,33	12,31	8,24	7,13	6,40
	8.1. Bank	8,56	14,76	7,63	7,11	8,45
	8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	8,54	12,23	6,39	6,87	9,25
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
	8.4. Sewa Bangunan	4,93	10,36	8,07	7,28	5,23
	8.5. Jasa Perusahaan	7,25	16,24	10,48	6,42	5,73
9	JASA – JASA	7,21	13,43	8,21	6,80	7,09
	a. Pemerintahan Umum	8,37	10,99	8,61	7,18	9,85
	1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	8,37	10,99	8,61	7,18	9,85
	2. Jasa Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Swasta	6,40	18,29	8,34	6,37	2,93
	1. Sosial Kemasyarakatan	5,54	16,24	6,41	4,87	5,25
	2. Hiburan dan Rekreasi	4,56	13,07	11,87	3,69	2,50
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	6,54	18,65	8,63	6,64	2,51
	JUMLAH PDRB	6,12	13,51	8,41	6,88	8,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

Dari data tabel 2.30, tampak bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2004, menunjukkan angka sebesar 6,12%, pada tahun 2005 sebesar 13,51%, tahun 2006 sebesar 8,41%. Di tahun 2007 menunjukkan angka sebesar 6,88% dan pada tahun 2008 sebesar 8,86%.

Tingginya tingkat inflasi tahun 2005 tersebut merupakan dampak nasional dari kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait dengan pengurangan subsidi harga BBM lebih dari 100 %, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini berpengaruh besar pada tingginya biaya transportasi dan komunikasi.

Tingkat inflasi yang tinggi tersebut telah memukul perekonomian masyarakat yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, naiknya angka kemiskinan serta turunnya standar hidup masyarakat.

Dengan tingkat inflasi tersebut, diharapkan hanya merupakan shock inflasi yang hanya terjadi seketika pada saat awal-awal kenaikan harga BBM, sehingga pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, diharapkan tingkat inflasi dapat kembali normal, dan tetap bertahan di bawah 10 %.

2.7. Modal Dasar dan Potensi

Berkembangnya suatu wilayah disebabkan oleh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti perkembangan jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi, transportasi dan sebagainya. Dengan keberadaan Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis yang cukup besar dalam konstelasi wilayah lokal, regional yang berpengaruh signifikan bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Kondisi demikian juga mempengaruhi berbagai kebijakan, penetapan sasaran dan strategi pencapaian sasaran pembangunan maupun program pembangunan yang diselaraskan dengan tuntutan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Dalam skala wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah Gerbang Kertosusila, Kabupaten Bangkalan juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk pengembangan wilayah kota primatnya yaitu kota Surabaya dan berperan sebagai wilayah penghasil industri manufaktur berskala nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Selanjutnya ditinjau dari aspek penataan ruang provinsi Jawa Timur melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur telah melahirkan kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Satuan Wilayah Pengembang (SWP mega urban

Surabaya). Dalam kebijakan ini juga diindikasikan munculnya wilayah Metropolitan SMA (Surabaya Metropolitan Area) yang berpusat di kota Surabaya.

Selanjutnya, modal dasar Pembangunan Kabupaten Bangkalan merupakan seluruh sumber kekuatan perekonomian yang dimiliki dan dapat didayagunakan dalam pembangunan, meliputi :

- 1) Secara geografis wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang pulau Madura;
- 2) Kabupaten Bangkalan dengan panjang pantai 125 km, dapat dikembangkan wisata dan Industri Kemaritiman yang ramah lingkungan;
- 3) Ketersediaan lahan sangat mendukung bagi pengembangan wilayah Industri, permukiman dan pariwisata dengan memanfaatkan keberadaan Suramadu;
- 4) Penduduk Kabupaten Bangkalan yang cukup besar jumlahnya merupakan SDM yang potensial bagi pembangunan;
- 5) Budaya masyarakat Bangkalan yang masih memegang teguh dengan falsafah Bhupa', Bhabuh, Guruh, Ratoh merupakan nilai kearifan lokal yang dapat mengendalikan laju modernisasi kearah yang lebih positif;
- 6) Kekayaan alam yang terkandung di darat dan di laut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pola penentuan isu-isu strategis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 40 menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) antara lain mencakup analisis isu-isu strategis. Dalam upaya menganalisa isu-isu strategis tersebut maka digunakan metode SWOT.

Isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada dasarnya adalah masalah/persoalan atau agenda yang perlu/harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah selang waktu 20 tahun. Strategis tidaknya suatu isu tertentu harus dinilai dari kerangka *urgensitas* dan *relevansi* penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian isu-isu strategis Kabupaten Bangkalan sesuai dengan analisis tersebut adalah :

3.1. Industrialisasi Pasca Suramadu

Pasca dioperasionalkan Jembatan Suramadu, kabupaten Bangkalan mengalami kemajuan perekonomian yang menggembirakan. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan berasal dari sektor tersier. Perkembangan sektor industri, properti dan perdagangan juga berkembang karena adanya proses *urban sprawl* yang terjadi meluas ke Bangkalan sebagai salah satu daerah penyangga Surabaya.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi memberikan multiplier effect bagi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga adanya peningkatan investasi dan relokasi industri berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi pariwisata berupa pesona alam, adat istiadat, seni dan budaya dapat dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan kepariwisataan, dengan

tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai setempat. Ekowisata dan desa wisata lebih ditekankan/menjadi prioritas sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pasca suramadu antara lain :

- a. Kesiapan sumber daya manusia;
- b. Daya saing produk lokal;
- c. Lemahnya kelembagaan UMKM;
- d. Pengaruh negatif budaya asing.

Berkaitan permasalahan tersebut diatas, diperlukan adanya langkah- langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kualitas produksi melalui pembinaan ketrampilan pada pengrajin, pemberdayaan kelembagaan UMKM serta menciptakan rasa kecintaan pada produk unggulan (lokal spesifik) dan meminimalisir pengaruh budaya asing. Disisi lain pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Bangkalan difokuskan kepada orientasi yang mampu memberikan insentif bagi tumbuhnya simpul-simpul ekonomi berbasis keunggulan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Penyiapan Infrastruktur Pendukung

3.2.1. Transportasi

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa telah membuka akses interkoneksi arus barang, jasa dan manusia. Namun keberadaan jembatan tersebut kurang didukung infrastruktur penunjang lainnya. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan infrastruktur baru dalam kerangka pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan.

Perencanaan jaringan transportasi pada Kabupaten Bangkalan didominasi oleh transportasi darat dengan peningkatan jaringan jalan yang terinterkoneksi dengan kawasan strategis Kabupaten Bangkalan dengan rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulupandan Kecamatan Klampis sebagai pelabuhan internasional dan Pelabuhan di Kecamatan Socah yang terintergrasi dengan kawasan industri. Rencana pengembangan jaringan jalan untuk pengembangan wilayah yaitu

pengembangan lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten di Madura, disamping juga pengembangan jalan-jalan sirip disekitar akses Suramadu yang merupakan rencana kawasan strategis nasional guna pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan.

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan prasarana terminal tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani trayek antar kota antar provinsi yang direncanakan di Kawasan Suramadu.

3.2.2. Telekomunikasi

Memperhatikan perkembangan pembangunan Kabupaten Bangkalan ke depan seiring dengan beroperasionalnya Jembatan Suramadu, kebutuhan teknologi telekomunikasi akan sangat diperlukan bagi perkembangan wilayah. Kemajuan teknologi yang disajikan dengan berbagai macam fasilitas telah menarik minat masyarakat yang semakin hari semakin menginginkan kemudahan.

Pengembangan teknologi telekomunikasi dengan masih memanfaatkan teknologi kabel menjadi kendala karena memerlukan investasi yang besar. Tetapi hal ini akan menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan jasa telekomunikasi baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi telekomunikasi.

Penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Selain mengoptimalkan jaringan telepon kabel, prasarana telematika dalam pengembangannya juga perlu penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station). Hal ini sangat penting untuk menjangkau pelosok pedesaan. Dengan perkembangan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kebutuhan dan pelayanan prasarana telematika, perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu :

1) Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;

2) Pembangunan

- 2) Pembangunan teknologi telematika pada kawasan pusat pertumbuhan;
- 3) Mengarahkan dan memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk provider seluler dengan pengelolaan dan pemanfaatan bersama.

3.2.3. Sumber Daya Air

Kabupaten Bangkalan memiliki 31 (tiga puluh satu) sungai yang mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Disamping itu, data impiris menunjukkan bahwa bulan hujan terjadi hampir setiap bulan kecuali bulan Juli dan September dengan rata-rata curah hujan antara 50 - 483 mm.

Selain itu juga terdapat akuifer atau air bawah tanah yang sangat tergantung pada kondisi geologi di wilayah setempat. Di Kabupaten Bangkalan terdapat formasi batuan gamping dengan potensi akuifer yang sangat tinggi, namun hal tersebut masih dipengaruhi oleh musim yang terjadi di kawasan tersebut.

Pengadaan air baku di Kabupaten Bangkalan sebagian besar berasal dari air permukaan dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kekurangan air permukaan. Ketersediaannya cenderung tetap setiap tahunnya, sedangkan kebutuhan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan memenuhi kebutuhan industri.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas air bersih yang digunakan untuk perkembangan wilayah dan rencana pengembangan industri di Kabupaten Bangkalan mengharuskan adanya perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan sungai untuk menjaga keberlangsungan kelestariannya. Untuk itu perlu ditetapkan fungsi tata air yang berbasis konservasi air.

Ketersediaan sumber daya air yang cukup besar dalam kenyataannya saat ini belum dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk mengantisipasi kekekuran air di Kabupaten Bangkalan diupayakan dengan pengembangan air baku dengan rencana pengembangan sumber daya air berupa rencana pembangunan waduk blega, pemanfaatan sumber

air baku alternatif, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pembangunan embung di masing-masing wilayah yang mempunyai potensi pengembangannya.

3.2.4. Sumber Daya Energi

Sebagai daerah yang berkembang pesat, pertumbuhan industri dan penduduk di Kabupaten Bangkalan yang cepat menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energi perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, air, angin, dan biofuel serta biogas yang jumlahnya sangat melimpah di Kabupaten Bangkalan. Selain dari pada itu dibutuhkan pasokan energi yang cukup besar melalui pembangunan pembangkit listrik baru.

Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah strategis Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan wilayah dan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap Kepala Keluarga akan memperoleh layanan jaringan listrik sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

3.3. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Bangkalan, tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin,

karena posisi mereka yang rentan dan ter subordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar kelas, antar daerah, dan antar yang dikuasai dan yang menguasai, serta melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan bahkan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas vertikal untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani bukan sekedar karena dan bersumber pada kelemahan dari masyarakat miskin itu sendiri, tetapi lebih karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan masyarakat miskin yang cenderung makin kompleks dan tidak ramah kepada masyarakat miskin.

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai (mismatch) dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (bargaining) masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan sub ordinasi, yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan

peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

3.4. Penurunan Produktivitas Sektor Pertanian

Perkembangan industri yang terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Bangkalan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan pertanian yang produktif semakin berkurang. Disisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah. Hal ini menyebabkan gairah petani bercocok tanam mengalami kelesuhan dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

Secara garis besar beberapa kelemahan di sektor pertanian antara lain terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industry, permukiman dan pusat perkantoran, rendahnya nilai tukar produk pertanian, lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian, mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak market friendly, kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas, kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, kurangnya sarana prasarana wilayah pendukung, pengembangan sistem agrobisnis dan ketersediaan pupuk organik dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan.

Dalam rangka menangani permasalahan di atas perlu diupayakan program yang mengarah pada perbaikan struktur produksi pangan yang meliputi :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi dengan kualitas baik;
- 2) Secara preventif dilakukan usaha untuk mewaspadai timbulnya kerawanan pangan dan gizi serta merumuskan langkah-langkah antisipasinya;

- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi terhadap petani.

3.5. Dampak Lingkungan Pembangunan Strategis.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya sinergisitas ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi isu global yang patut ditekankan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan. Salah satu butir dari *millenium development goals* (MDGs) adalah kelestarian lingkungan hidup yang memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Pada masa mendatang, industrialisasi tidak hanya membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan, akan tetapi juga menimbulkan efek negatif berupa pencemaran lingkungan dan alam sekitarnya, akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Dalam rangka meminimalisir dampak negatif tersebut diperlukan kebijakan industrialisasi yang mengedepankan pelestarian lingkungan.

Pengembangan prasarana lingkungan seperti tempat pembuangan akhir harus terus diperhatikan, karena semakin lama laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan tentunya membutuhkan prasarana lingkungan yang memadai. Penyediaan prasarana lingkungan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun kenyataannya justru permasalahan timbul karena kesadaran masyarakat yang kurang, sehingga tempat pembuangan akhir kurang optimal kejadian ini seperti masih dapat dilihat adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Kabupaten Bangkalan akan terus berkembang, hal ini harus mendapat tanggapan serius dalam penyediaan prasarana lingkungan seperti tempat pembuangan akhir dan pengolahan limbah beracun B3. Lokasi prasarana lingkungan perlu memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan dalam penempatan lokasi.

BAB IV

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

4.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bangkalan sampai saat ini, isu-isu strategis dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 adalah :

"Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani."

Pernyataan Visi Kabupaten Bangkalan di atas, memiliki makna :

- 1) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Industri*** merupakan perwujudan bahwa Bangkalan akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan wilayah di kawasan kepulauan Madura serta mempersiapkan diri sebagai wilayah penyangga Surabaya dengan menjadikan wilayah Bangkalan sebagai kawasan industri terpadu. Pembangunan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten industri juga mengacu kepada nilai-nilai dasar agama dan budaya lokal sebagai landasan ekonomi yang kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, iklim investasi dalam meningkatkan kemajuan ekonomi daerah serta tetap melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang dicerminkan dalam hubungan kerjasama ekonomi yang erat dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
- 2) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Perdagangan*** merupakan cerminan bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bangkalan akan berorientasi pada kegiatan perdagangan baik lokal, regional, nasional, dan internasional serta menata kesiapan dalam berkompetisi pada era global;
- 3) Bangkalan ***Sebagai Kabupaten Jasa*** merupakan cerminan bahwa Kabupaten Bangkalan akan melakukan perubahan orientasi peningkatan

penghasilan daerah dari sektor pertanian yang sangat dominan ke sektor jasa. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Daerah sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional;

- 4) **Masyarakat Madani** sebagai sistem sosial yang berlandaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Pelaksanaannya antara lain berupa pelaksanaan pemerintahan yang tunduk pada undang-undang dan terselenggaranya sistem pemerintahan yang transparan. Dalam kriteria pelaksanaan lainnya, dapat dilihat dengan adanya **Democratic Governance** (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan **Democratic Civilian** (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, *civil responsibility* dan *civil resilience*).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan tata nilai sebagai berikut:

- 1) Menciptakan nilai-nilai yang mampu memelihara eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat;
- 2) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban serta keselamatan yang dijamin hak dan kewajibannya;
- 3) Menegakkan nilai-nilai yang menjamin dan menegakkan pemikiran yang jernih dan sehat;
- 4) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu menciptakan eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturahmi dan tenggang rasa satu sama lainnya;
- 5) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan (*win - win decision and solution*);
- 6) Membangun dan menegakkan nilai-nilai yang tidak memberatkan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 7) Menumbuhkan, menegakkan, dan membangun nilai-nilai bebas memilih dari masyarakat terhadap alternatif yang optimum dan paling mungkin serta santun, beradab serta bermoral tinggi.

Untuk mewujudkan 7 tata nilai di atas dibutuhkan **Lima Pilar Pendukung** yaitu:

- 1) **Ulama**, cendekiawan dan intelektual yang mau dan peduli kepada lingkungannya;
- 2) **Pemerintah** yang bersifat adil dan seimbang terhadap amanah yang diembannya demi kemaslahatan masyarakat;
- 3) **Pelaku Perekonomian** harus jujur dan tidak berkhianat terhadap masyarakat dan lebih mensejahterakan masyarakat;
- 4) **Pekerja atau Pegawai** harus setia dalam menjalankan tugas atau profesinya sebagai amanat yang dititipkan padanya;
- 5) **Rakyat** loyal dan penuh partisipatif.

4.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi terciptanya Pembangunan Kehidupan Beragama, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pembangunan, Pembangunan Pemuda dan Olah Raga.

2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa, Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas), Pengelolaan Kawasan Pertambangan, Pengembangan Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

3) Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana wilayah melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan misi ini dicapai dengan cara mengembangkan *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good government)* melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Hukum, Pembangunan keamanan dan ketertiban, Pembangunan Politik dan Pembangunan Komunikasi dan Informasi.

4.3. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangkalan dilaksanakan melalui strategi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.

Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi lokal di semua wilayah produksi domestik masyarakat Kabupaten Bangkalan, sehingga mampu menghasilkan produksi

lokal dan nilai tambah bruto. Sedangkan strategi pertumbuhan yang berkualitas diupayakan melalui penciptaan basis fundamental pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh dominasi investasi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan, pemenuhan hak-hak sosial dasar masyarakat akan dapat dipenuhi secara lebih adil dan merata dalam hal hak atas pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, lapangan kerja secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) dan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku pembangunan melalui pembukaan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Tujuan Rencana Jangka Panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang tangguh sebagai arahan atau pedoman dalam pelaksanaan proses Perencanaan Pembangunan selama 20 tahun kedepan, sehingga mewujudkan tatanan masyarakat madani di Kabupaten Bangkalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya-upaya perwujudan visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan misi dan strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui penjabaran dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

5.1.1. Arah Kebijakan sesuai Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pembangunan Kehidupan Beragama

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat serta membentuk ahlak mulia dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya, dengan agenda :

- a. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan;
- b. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama;
- c. Peningkatan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah;

d. Peningkatan

- d. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara utuh sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial.

2. Arah Pembangunan Pendidikan

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia serta membentuk kapasitas dalam kompetensi era globalisasi, dengan agenda :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan;
- c. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan.

3. Arah Pembangunan Kesehatan

Kebijakan ini diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan agenda :

- a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan;
- d. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas;
- e. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan;

- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
- h. Peningkatan Pemahaman pola hidup sehat masyarakat.

4. Arah Pembangunan Kependudukan

Kebijakan ini diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk, dengan agenda :

- a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
- b. Peningkatan tertib administrasi kependudukan;
- c. Peningkatan pembinaan calon transmigran;
- d. Peningkatan kualitas penduduk.

5. Arah Pembangunan Ketenagakerjaan

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan pekerja, dengan agenda :

- a. Peningkatan keterampilan pencari kerja;
- b. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal;
- c. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis;
- e. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan;
- g. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan;
- h. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja;
- i. Penanganan pengangguran melalui padat karya.

6. Arah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan, memberi dan menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak, dengan agenda :

- a. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah;

- c. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- d. Penguatan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.

7. Arah Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat, dengan agenda :

- a. Pelestarian budaya lokal dan tradisional;
- b. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda;
- c. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional;
- d. Peningkatan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya;
- e. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni.

8. Arah Pembangunan Pemuda dan Olah Raga

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia di bidang olah raga yang memiliki karakter kebangsaan serta memiliki wawasan kebangsaan, dengan agenda :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda;
- c. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda;
- d. Penataan system pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga;
- f. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Parameter keberhasilan misi mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani, handal, berahlak mulia dan berbudaya ditandai dengan menurunnya konflik umat Beragama, menurunnya angka buta huruf, meningkatnya rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya partisipasi sekolah; meningkatnya angka harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi;

menurunnya

menurunnya prevelensi kurang gizi; terkendalnya laju pertumbuhan penduduk; perluasan lapangan kerja; menurunnya angka pengangguran; meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *Trafficking*; meningkatnya prestasi olah raga.

5.1.2. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan misi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai sokoguru ekonomi dan daya saing UMKM, dengan agenda :

- a. Peningkatan Usaha yang kondusif;
- b. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. Penciptaan dan Penumbuhan wirausaha baru;
- d. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
- e. Pengembangan kerjasama yang sinergis dan saling memperkuat antar wilayah Kabupaten Bangkalan dengan wilayah lain.

2. Arah Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi perindustrian dalam menopang sektor perdagangan dan jasa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan agenda:

- a. Persiapan pelayanan perijinan terpadu;
- b. Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah;
- c. Pengembangan system informasi pasar;
- d. Peningkatan promosi dan investasi daerah;
- e. Peningkatan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional.

3. Arah Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas) :

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, dengan agenda:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
- b. Penataan tugas dan fungsi penyuluh dan lembaga pendukungnya;
- c. Peningkatan produktivitas bahan pangan;
- d. Peningkatan aksesibilitas pertanian;
- e. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.

4. Arah Pengelolaan Kawasan Pertambangan

Kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan agenda:

- a. Penyusunan regulasi pertambangan;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;
- c. Pengembangan dan pembinaan usaha tambang;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

5. Arah Pengembangan Pariwisata

Kebijakan ini diarahkan pada pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan agenda:

- a. Penyusunan perencanaan pariwisata;
- b. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata;
- c. Peningkatan potensi pariwisata;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- e. Peningkatan sumber daya manusia;
- f. Peningkatan promosi pariwisata;
- g. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.

6. Arah Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan absolut, dengan agenda:

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin;
- c. Peningkatan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha;
- d. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

7. Arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan ini diarahkan pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan agenda:

- a. Peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar;
- b. Peningkatan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat;
- c. Penciptaan dan Penumbuhan Pontensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pengembangan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.

Parameter keberhasilan misi kedua ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, meningkatnya kontribusi pangan Kabupaten Bangkalan, meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, membaiknya indeks Nilai Tukar Petani/Nelayan, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

5.1.3. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan misi Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya penanganan infrastruktur transportasi guna menggerakkan roda perekonomian, dengan agenda:

- a. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- b. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
- c. Peningkatan jalan desa dan lingkungan;

- d. Pembangunan system transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.

2. Arah Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan agenda:

- a. Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air;
- b. Pengembangan sumber daya alam buatan;
- c. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
- d. Pendayagunaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengkajian dan pemanfaatan teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.

3. Arah Perumahan dan Permukiman

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pemenuhan perumahan yang sehat bagi masyarakat dan terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman guna pemerataan dan penyebaran penduduk serta pembangunan, dengan agenda:

- a. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah;
- b. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan;
- c. Pengembangan lingkungan permukiman sehat;
- d. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara;
- e. Pengembangan Teknologi Tepat Guna bidang Permukiman.

4. Arah Pengembangan Wilayah

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, dengan agenda:

- a. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal;
- b. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis;

- c. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- d. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.

5. Arah Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai peruntukan, dengan agenda:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis;
- b. Sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas kawasan yang mencakup sektor seperti status pemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana permukiman, meningkatnya luas layanan air baku serta didukung perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

5.1.4. Arah Kebijakan sesuai Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam mewujudkan misi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui kebijakan meliputi :

1. Arah Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan, dengan agenda:

- a. Penyusunan dan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.

2. Arah Pembangunan Hukum

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pemantapan fungsi dan peran pemerintah dalam penegakan supremasi hukum, dengan agenda:

- a. Penataan produk hukum sesuai herarki per undang-undangan dan kearifan lokal;
- b. Penguatan fungsi kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum;
- c. Pembangunan budaya masyarakat yang sadar hukum;
- d. Penegakan supremasi hukum.

3. Arah Pembangunan keamanan dan ketertiban

Kebijakan ini diarahkan pada upaya optimalisasi peran dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan kondusivitas lingkungan masyarakat, dengan agenda:

- a. Penataan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian;
- c. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah;
- d. Pengembangan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

4. Arah Pembangunan Politik

Kebijakan ini diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis, dengan agenda:

- a. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya;
- b. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik;
- c. Pemantapan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.

5. Arah Pembangunan Komunikasi dan Informasi

Kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat sadar informasi dan transparansi, dengan agenda:

- a. Penataan layanan Informasi multimedia yang berkualitas;
- b. Perluasan jaringan dan layanan informasi;
- c. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya transparansi informasi pelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat, menegakkan supremasi hukum dan menurunnya indeks kriminalitas.

5.2. Tahapan Dan Skala Prioritas

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1 Tahap Pertama (2005 - 2009)

Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakan pondasi untuk mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh menuju terciptanya masyarakat madani. Hal ini ditempuh melalui arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembangunan kebudayaan serta pembangunan pemuda dan olah raga untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.

Pada bidang ekonomi diupayakan untuk memulihkan dan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa; pengembangan sumber daya pertanian; pengelolaan kawasan pertambangan; pengembangan pariwisata; penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan

dan

dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal.

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan perkuatan infrastruktur, penanganan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan perekonomian masyarakat. Kebijakan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun aspek pengelolaannya. Aspek fisik meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan sarana sumber daya air dan energi. Sedangkan aspek pengelolaan meliputi pengembangan wilayah dan regulasi pemanfaatan ruang.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur dilakukan dengan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi.

5.2.2 Tahap kedua (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, maka pembangunan tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali disegala bidang dengan menekankan upaya pembangunan kehidupan beragama; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembangunan kebudayaan serta pembangunan pemuda dan olah raga untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.

Pada tahap ini pembangunan perekonomian tetap melanjutkan sesuai dengan tahap pertama yaitu diupayakan untuk memulihkan dan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa;

pengembangan sumber daya pertanian; pengelolaan kawasan pertambangan; pengembangan pariwisata; penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi religi dan budaya yang unik. Wilayah Kabupaten Bangkalan yang masuk dalam kawasan Surabaya Metropolitan Area (SMA) merupakan pusat pertumbuhan baru dengan didukung adanya jembatan Suramadu. Topografi yang beragam, dan memiliki potensi yang tersebar pada kawasan pegunungan dan pesisir merupakan kutub pertumbuhan bagi perkembangan pariwisata di Jawa Timur. Pada sektor kepariwisataan beberapa hal yang telah direncanakan pada tahap pertama diimplementasikan dengan mengeksplorasi potensi-potensi wisata alam dan buatan, termasuk melakukan revitalisasi obyek-obyek pariwisata yang sudah berkembang.

Keberadaan jembatan Suramadu di kabupaten Bangkalan memunculkan Kawasan Strategis ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan iklim investasi. Untuk mendukung hal dimaksud pada tahap ini tetap menekankan pada peningkatan sarana dan prasarana wilayah seperti yang telah dilaksanakan pada tahap pertama melalui kebijakan optimalisasi perkuatan infrastruktur, penanganan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan perekonomian masyarakat.

Pada tahap ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan kajian kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap pertama yaitu dengan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan

aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi.

5.2.3 Tahap ketiga (2015 - 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih dimantapkan secara menyeluruh penataan kembali disegala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Pada tahap ini, pembangunan perekonomian tetap melanjutkan sesuai dengan tahap kedua melalui kebijakan peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM; peningkatan penguatan struktur industri, perdagangan dan jasa; peningkatan sumber daya pertanian; peningkatan pengelolaan kawasan pertambangan; peningkatan kepariwisataan; penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dengan tetap mengedepankan potensi lokal yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang strategis sebagai bagian dari konsep Gerbang Kertosusila Plus. Posisi ini sangat menguntungkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang saling memperkuat antar wilayah. Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan upaya kerjasama antar wilayah baik yang bersifat bilateral maupun multilateral antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahap ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah

strategis seperti penyediaan kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap kedua yaitu dengan tetap melakukan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi. Disamping itu untuk mendukung kemudahan didalam berinvestasi di Kabupaten Bangkalan melakukan pengembangan system dan prosedur pelayanan perijinan dengan berbasis teknologi informasi.

5.2.4 Tahap keempat (2020-2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada tersedianya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kesalehan individu dan kesalehan sosial, berpendidikan serta berpola hidup sehat disertai kemampuan yang memadai sebagai pelaku pembangunan.

Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Struktur perekonomian telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan lptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur

perdesaan akan terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Pentahapan RPJPD Kabupaten Bangkalan tersebut, selanjutnya menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel Matriks Tahapan berikut ini :

Matrik Tahapan dan Skala Prioritas

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
1. Arah Pembangunan Kehidupan Beragama	AGENDA: 1.Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan; 2.Peningkatan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama; 3.Peningkatan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah;	AGENDA: 1. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan; 2. Peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama; 3. Peningkatan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah;	AGENDA: 1.Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan; 2.Peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama; 3.Pemantapan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah;	AGENDA: 1. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah keagamaan; 2. Pemantapan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat bergama; 3. Pelestarian pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah; 4. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara utuh sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial.

2.Arah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
2. Arah Pembangunan Pendidikan	AGENDA 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 5.Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 6.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 7.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 8.Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan;	AGENDA 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 2.Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 3.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 5.Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan;	AGENDA 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 2.Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 3.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 5.Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan;	AGENDA 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 2.Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 3.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 5.Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan;

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
3. Arah Pembangunan Kesehatan	AGENDA 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas; 5. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;	AGENDA 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas; 5. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;	AGENDA 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas; 5. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; 8. Peningkatan Pemahaman pola hidup sehat masyarakat	AGENDA 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas; 5. Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; 8. Pemantapan pola hidup sehat masyarakat

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
4. Arah Pembangunan Kependudukan	AGENDA 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan; 3. Peningkatan pembinaan calon transmigran; 4. Peningkatan kualitas penduduk.	AGENDA 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan; 3. Peningkatan pembinaan calon transmigran; 4. Peningkatan kualitas penduduk	AGENDA 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan; 3. Peningkatan pembinaan calon transmigran; 4. Peningkatan kualitas penduduk	AGENDA 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan; 3. Peningkatan pembinaan calon transmigran; 4. Pengembangan kualitas penduduk
5. Arah Pembangunan Ketenagakerjaan	AGENDA 1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.	AGENDA 1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.	AGENDA 1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.	AGENDA 1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.

7. Pelatihan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
	7. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan; 8. Penanganan pengangguran melalui padat karya.	7. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan; 8. Penanganan pengangguran melalui padat karya.	7. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan; 8. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja 9. Penanganan pengangguran melalui padat karya.	7. Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan; 8. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja. 9. Penanganan pengangguran melalui padat karya.
6. Arah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	AGENDA 1. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah; 3. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	AGENDA 1. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah; 3. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 4. Penguatan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.	AGENDA 1. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah; 3. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 4. Penguatan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.	AGENDA 1. Peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah; 3. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 4. Pemantapan kelembagaan gender, Peningkatan kualitas hidup dan Pemberdayaan ekonomi perempuan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
7. Arah Pembangunan Kebudayaan	AGENDA 1. Pelestarian budaya lokal dan tradisional; 2. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda; 3. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional; 4. Peningkatan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.	AGENDA 1. Pelestarian budaya lokal dan tradisional; 2. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda; 3. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional; 4. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat; 5. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.	AGENDA 1. Pelestarian budaya lokal dan tradisional; 2. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda; 3. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional; 4. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat; 5. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.	AGENDA 1. Pelestarian budaya lokal dan tradisional; 2. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat khususnya generasi muda; 3. Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal dan tradisional; 4. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat; 5. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.
8. Arah Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	AGENDA 1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 3. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda; 4. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga;	AGENDA 1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 3. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda; 4. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga	AGENDA 1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 3. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda; 4. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga	AGENDA 1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; 3. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda; 4. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
	5. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.	secara terpadu dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; 6. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.	secara terpadu dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; 6. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.	secara terpadu dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; 6. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Parameter keberhasilan misi mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani, handal, berahlak mulia dan berbudaya ditandai dengan menurunnya konflik umat Beragama, menurunnya angka buta huruf, meningkatnya rasio SMK terhadap SMA ; meningkatnya partisipasi sekolah; meningkatnya angka harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevelensi kurang gizi; terkendalinya laju pertumbuhan penduduk ; perluasan lapangan kerja; menurunnya angka pengangguran; meningkatnya indek kesetaraan gender; menurunnya angka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *Trafficking*; meningkatnya prestasi olah raga.

Misi II : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	AGENDA : 1. Peningkatan Usaha yang kondusif; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM; 3. Penciptaan dan Penumbuhan wirausaha baru; 4. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.	AGENDA : 1. Peningkatan Usaha yang kondusif; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang berbasis IPTEK; 3. Penciptaan dan peningkatan wirausaha baru; 4. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.	AGENDA : 1. Peningkatan Usaha yang kondusif; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang berbasis IPTEK; 3. Pengembangan kerjasama ekonomi yang sinergis dan saling memperkuat antar wilayah Bangkalan dengan wilayah lain; 4. Pengembangan wirausaha; 5. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.	AGENDA : 1. Peningkatan Usaha yang kondusif; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang berbasis IPTEK; 3. Pengembangan kerjasama ekonomi yang sinergis dan saling memperkuat antar wilayah Bangkalan dengan wilayah lain; 4. Pemantapan wirausaha; 5. Pengembangan dan penguatan UKM untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Penguatan Struktur Industri, Perdagangan dan Jasa	AGENDA : 1. Persiapan pelayanan perijinan terpadu; 2. Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah; 3. Pengembangan sistem informasi pasar; 4. Peningkatan promosi dan investasi daerah; 5. Peningkatan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional;	AGENDA : 1. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu; 2. Peningkatan penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah; 3. Peningkatan Pengembangan sistem informasi pasar; 4. Peningkatan promosi dan investasi daerah; 5. Peningkatan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional;	AGENDA : 1. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu berbasis teknologi informasi; 2. Peningkatan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah; 3. Peningkatan sistem informasi pasar; 4. Peningkatan promosi dan investasi daerah; 5. Peningkatan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional;	AGENDA : 1. Pemantapan pelayanan perijinan terpadu berbasis teknologi informasi; 2. Pemantapan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah; 3. Pemantapan sistem informasi pasar; 4. Pemantapan promosi dan investasi daerah; 5. Pemantapan kemitraan usaha ekonomi lokal dengan regional;

3. Pengembangan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
3. Pengembangan Sumber Daya Pertanian (dalam arti luas)	AGENDA : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 2. Penataan tugas dan fungsi penyuluh dan lembaga pendukungnya; 3. Peningkatan produktivitas bahan pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pertanian; 5. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.	AGENDA : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 2. Pengembangan tugas dan fungsi penyuluh dan lembaga pendukungnya; 3. Peningkatan produktivitas bahan pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pertanian; 5. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.	AGENDA : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 2. Peningkatan kapasitas penyuluh dan lembaga pendukungnya; 3. Peningkatan produktivitas bahan pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pertanian; 5. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.	AGENDA : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 2. Peningkatan kapasitas penyuluh dan lembaga pendukungnya; 3. Peningkatan produktivitas bahan pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pertanian; 5. Peningkatan diversifikasi usaha dalam mendukung produksi pangan.
4. Pengelolaan Kawasan Pertambangan	AGENDA : 1. Penyusunan regulasi pertambangan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Pengembangan dan pembinaan usaha tambang; 4. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.	AGENDA : 1. Penyusunan regulasi pertambangan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Peningkatan pembinaan usaha tambang; 4. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.	AGENDA : 1. Penyusunan regulasi pertambangan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Peningkatan pembinaan usaha tambang; 4. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.	AGENDA : 1. Penyusunan regulasi pertambangan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Peningkatan pembinaan usaha tambang; 4. Pemeliharaan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
5. Pengembangan Pariwisata	AGENDA : 1. Penyusunan perencanaan pariwisata; 2. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata; 3. Peningkatan potensi pariwisata; 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; 5. Peningkatan sumber daya manusia; 6. Peningkatan promosi pariwisata; 7. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.	AGENDA : 1. Peningkatan potensi pariwisata; 2. Peningkatan sumber daya manusia; 3. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata; 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; 5. Peningkatan promosi pariwisata; 6. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.	AGENDA : 1. Peningkatan potensi pariwisata; 2. Peningkatan sumber daya manusia; 3. Peningkatan obyek wisata; 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; 5. Peningkatan promosi pariwisata; 6. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.	AGENDA : 1. Peningkatan potensi pariwisata; 2. Peningkatan sumber daya manusia; 3. Peningkatan obyek wisata; 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; 5. Peningkatan promosi pariwisata; 6. Peningkatan kemitraan dunia usaha kepariwisataan.
6. Penanggulangan Kemiskinan	AGENDA : 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin; 3. Peningkatan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha; 4. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.	AGENDA : 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin; 3. Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha; 4. Peningkatan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.	AGENDA : 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin; 3. Pengembangan dan ketrampilan kelembagaan masyarakat miskin dalam kemampuan berusaha; 4. Peningkatan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.	AGENDA : 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin; 3. Pemantapan ketrampilan kelembagaan masyarakat miskin dalam kemampuan berusaha; 4. Pemantapan Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
7. Pembangunan Kesejahteraan Sosial	AGENDA : 1. Peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar; 2. Peningkatan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat; 3. Penciptaan dan Penumbuhan Potensi sumber kesejahteraan sosial; 4. Pengembangan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.	AGENDA : 1. Optimalisasi aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar; 2. Peningkatan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat; 3. Peningkatan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 4. Optimalisasi pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.	AGENDA : 1. Penguatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar; 2. Penguatan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat 3. Penguatan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 4. Penguatan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.	AGENDA : 1. Pemantapan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar; 2. Pemantapan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat; 3. Pemantapan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 4. Pemantapan pembiayaan Jamsosda dan perlindungan sosial.

Parameter keberhasilan misi kedua ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, meningkatnya kontribusi pangan Kabupaten Bangkalan, meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, membaiknya indeks Nilai Tukar Petani/Nelayan, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Misi III : Mewujudkan Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	AGENDA : 1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; 2. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi; 3. Peningkatan jalan desa dan lingkungan; 4. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal.	AGENDA : 1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; 2. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi; 3. Peningkatan jalan desa dan lingkungan; 4. Optimalisasi sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal.	AGENDA : 1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; 2. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi; 3. Peningkatan jalan desa dan lingkungan; 4. Penguatan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal.	AGENDA : 1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan; 2. Pemeliharaan, peningkatan dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi; 3. Peningkatan jalan desa dan lingkungan; 4. Pemantapan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi	AGENDA : 1. Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air; 2. Pengembangan sumber daya alam buatan; 3. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; 4. Pendayagunaan sarana dan prasarana sumber daya air.	AGENDA : 1. Peningkatan Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air; 2. Optimalisasi sumber daya alam buatan; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; 4. Optimalisasi sarana dan prasarana sumber daya air; 5. Pengkajian teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.	AGENDA : 1. Optimalisasi Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air; 2. Penguatan Pemanfaatan sumber daya alam buatan; 3. Penguatan Pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; 4. Penguatan sarana dan prasarana sumber daya air; 5. Pemanfaatan teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.	AGENDA : 1. Pemantapan Konservasi Sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air; 2. Pemantapan Pemanfaatan sumber daya alam buatan; 3. Pemantapan Pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; 4. Penguatan sarana dan prasarana sumber daya air; 5. Pemanfaatan teknologi guna mencari sumber energi untuk pemenuhan industri.

3. Pemukiman

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
3. Perumahan dan Permukiman	AGENDA : 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah; 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan; 3. Pengembangan lingkungan permukiman sehat; 4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara; 5. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Permukiman.	AGENDA : 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah; 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan; 3. Pengembangan lingkungan permukiman sehat; 4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara; Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Permukiman.	AGENDA : 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah; 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan; 3. Pengembangan lingkungan permukiman sehat; 4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara; Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Permukiman.	AGENDA : 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan perekonomian wilayah; 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan persampahan; 3. Pengembangan lingkungan permukiman sehat; 4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara; Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Permukiman.
4. Pengembangan Wilayah	AGENDA : 1. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal; 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis; 3. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 4. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.	AGENDA : 1. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal; 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis; 3. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 4. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.	AGENDA : 1. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal; 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis; 3. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 4. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.	AGENDA : 1. Pengembangan kawasan strategis, agropolitan dan kawasan tertinggal; 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis; 3. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 4. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat.

5. Penyelenggaraan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang	AGENDA : 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis; 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.	AGENDA : 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis; 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.	AGENDA : 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis; 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.	AGENDA : 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis; 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas kawasan yang mencakup sektor seperti status pemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana permukiman, meningkatnya luas layanan air baku serta didukung perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	AGENDA : 1. Penyusunan dan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM); 2. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.	AGENDA : 1. Optimalisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM); 2. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.	AGENDA : 1. Optimalisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM); 2. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.	AGENDA : 1. Optimalisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM); 2. Peningkatan kualitas teknologi informasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Peningkatan kinerja dan pengawasan birokrasi berbasis kompetensi.
2. Pembangunan Hukum	AGENDA : 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki per undang-undangan dan kearifan lokal; 2. Penguatan fungsi kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 3. Pembangunan budaya masyarakat yang sadar hukum; 4. Penegakan supremasi hukum.	AGENDA : 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki per undang-undangan dan kearifan lokal; 2. Penatalaksanaan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 3. Peningkatan budaya masyarakat yang sadar hukum; 4. Penegakan supremasi hukum.	AGENDA : 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki per undang-undangan dan kearifan lokal; 2. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 3. Peningkatan budaya masyarakat yang sadar hukum; 4. Penegakan supremasi hukum.	AGENDA : 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki per undang-undangan dan kearifan lokal; 2. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 3. Peningkatan budaya masyarakat yang sadar hukum; 4. Penegakan supremasi hukum.

3. Pembangunan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
3. Pembangunan keamanan dan ketertiban	AGENDA : 1. Penataan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian; 3. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah; 4. Pengembangan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.	AGENDA : 1. Penataan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian; 3. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah; 4. Pengembangan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.	AGENDA : 1. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian; 3. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah; 4. Penguatan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.	AGENDA : 1. Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengembangan kerjasama dengan kepolisian; 3. Pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah; 4. Pemantapan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
4. Pembangunan Politik.	AGENDA : 1. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya; 2. Penumbuhan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.	AGENDA : 1. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya; 2. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik; 3. Pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.	AGENDA : 1. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya; 2. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik; 3. Pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.	AGENDA : 1. Pemantapan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya; 2. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan politik; 3. Pemantapan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.

5. Pembangunan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010-2014)	TAHAP III (2015-2019)	TAHAP IV (2020-2024)
5. Pembangunan Komunikasi dan Informasi	AGENDA : 1. Penataan layanan Informasi multimedia yang berkualitas; 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi.	AGENDA : 1. Pembinaan layanan Informasi multimedia yang berkualitas; 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi; 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.	AGENDA : 1. Peningkatan layanan Informasi multimedia yang berkualitas; 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi; 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.	AGENDA : 1. Pemantapan layanan Informasi multimedia yang berkualitas; 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi; 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Parameter keberhasilan dari misi ini adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya transparansi informasi pelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat, menegakkan supremasi hukum dan menurunkan indeks kriminalitas.

BAB VI

PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan dengan memanfaatkan kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas (*value for money*) melalui optimalisasi penerimaan daerah baik bersumber intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, efisiensi dan efektifitas pendanaan pembangunan, optimalisasi lembaga mikro.

6.2. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah

6.2.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dilakukan melalui upaya intensifikasi pajak maupun retribusi daerah dengan optimalisasi aset daerah, optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pelayanan. Sedangkan upaya ekstensifikasi diupayakan melalui perluasan pelayanan. Sedangkan upaya ekstensifikasi diupayakan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat, mengoptimalkan skema-skema bagi hasil pengolahan minyak dan gas bumi di Jawa Timur.

b. Optimalisasi Penerimaan Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dilakukan jika APBD dalam keadaan defisit dan dilakukan dengan kecukupan DCSR (*Debt Coverage Service Ratio*), hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kesehatan APBD secara lebih baik, sehingga tingkat pengembalian (*re-payment*) dapat berjalan dengan lancar. Pinjaman Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, bahwa pinjaman daerah, merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman Daerah sebagaimana Pasal 7 PP 54 Tahun 2005 terdiri dari:

- 1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan;
- 2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan;
- 3) Penerimaan Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 8 bahwa pinjaman jangka pendek bersumber dari :

- 1) Pemerintah Daerah Lain;
- 2) Lembaga Keuangan Bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Lembaga Keuangan Bukan Bank Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat dan kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pinjaman Daerah jangka menengah dan jangka panjang bersumber dari pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri serta pemerintah Daerah.

c. Obligasi Daerah

Era pelaksanaan otonomi saat ini adalah saatnya bagi Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dan mulai mandiri dalam mengurus dan membangun rumah tangga daerahnya. Artinya secara operasional pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas–tugas berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Terkait dengan hal tersebut dalam menyikapi batas kemampuan APBD dalam menyediakan dana pembangunan daerah, maka daerah perlu mencari dan memanfaatkan sumber dana pinjaman yang berasal dari masyarakat dan swasta lokal atau pinjaman yang berasal dari daerah yang lebih mampu salah satunya adalah Obligasi.

Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan lain sebagainya .

Beberapa macam obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas pengembalian hutang pokok dan bunganya meliputi:

- 1) Obligasi Umum (*General Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten /kota untuk membiayai investasi dengan jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah tanpa transfer ;
- 2) Obligasi pendapatan (*Revenue Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan proyek tersebut, dan;
- 3) Obligasi *Barelled* atau *Hybrid Obligation* yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan proyek tersebut.

Selain perlu kepercayaan dari masyarakat, lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha, serta semakin efesiennya Pemerintah Kabupaten, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan obligasi ini antara lain adalah :

- 1) Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah;
- 2) Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah;
- 3) Membuat Kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah;

- 4) Membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah;
- 5) Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah
- 6) Mendapatkan persetujuan dari DPRD;
- 7) Analisa kemampuan Pinjam;
- 8) Analisa IRR;
- 9) Analisa biaya hutang (*cost of debt*).

6.2.2. Efisiensi dan efektivitas Pendanaan Pembangunan

a. Memperkuat dan memperluas kemitraan (*Public-Private Partnership*)

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dinegara berkembang saat ini peningkatan sektor perekonomian peran swasta semakin meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat dan memperluas kemitraan atau kerja sama yaitu pemerintahan swasta, dan masyarakat adalah:

- 1) Perumusan model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
- 2) Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra Pemerintah Daerah, dan;
- 3) Membangun model kemitraan yang efektif : kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah dengan swasta, Pemerintah dengan masyarakat antar swasta, dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan;
- 4) Kemitraan / kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai model, antara lain : *Leasses and Concession (LC)*, *Built Operations and Transfer (BOT)*, atau *Public – Private Partnership*.

b. Pemanfaatan

b. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, terutama masyarakat disekeliling lingkungan sosial, dimana perusahaan tersebut berada yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan wajib melaksanakan CSR, bila tidak perusahaan akan dikenai sanksi, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak menyentuh sama sekali dengan sumber daya alam boleh melaksanakan CSR dengan suka rela.

Dengan mempertimbangkan program-program pembangunan di Kabupaten Bangkalan, maka diharapkan adanya pepaduan program CSR dengan program pemerintah sehingga diharapkan implementasi program CSR mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Potensi CSR cukup besar dan efektifitas pemanfaatan CSR dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan integritasi pola pendanaan obyek kegiatan dalam hal sinkronisasi waktu pelaksanaan, urusan dan lokasi yang akan didanai serta jangka waktu penanganan Obyek/target group.

c. Pendanaan Pembangunan dengan Pola Cost Sharing antara Pemerintah Pusat - Provinsi – Kabupaten/Kota (*Government to Government Partnership*)

Pola pembiayaan model cost sharing ini dilakukan melalui kesepakatan pengalokasian belanja antara Pemerintah Pusat – Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Konsep ini untuk mengoptimalkan efektifitas belanja yang potensinya terbatas mengoptimalkan perluasan target group.

d. Mengembangkan

d. Mengembangkan Privatisasi /Swastanisasi

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai *The Engine of Growth* dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang seluas-luasnya (*catalytic goverment*) peran investasi swasta / masyarakat untuk sektor usaha yang *full cost recovery* dalam rangka mendorong dan mengembangkan privatisasi / swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang secara efisien dan dikelola sektor swasta).

Langkah – langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Penyusunan kriteria privatisasi secara transparan;
- 2) Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta;
- 3) Meningkatkan dan memperluas keikutsertaan peran swasta untuk membangun prasarana dan sarana pelayanan.

Privatisasi yang dapat dikembangkan antara lain dalam pengelolaan pelabuhan terminal peti kemas, perparkiran, persampahan, limbah manusia/tinja. air bersih dan tempat wisata/rekreasi yang dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta.

Untuk mendukung kegiatan dalam menunjang sektor swasta dalam pembangunan diperlukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten membuat system peraturan yang berkaitan dengan pemberian izin-izin usaha , lokasi , investasi yang konsisten, mudah dilaksanakan, dan terbuka;
- 2) Membenahi kualitas pelayanan dilingkungan organisasi pemerintah dengan menetapkan standart pelayan dngan prinsip: kesederhanaan dan ketetapan waktu , kejelasan , dan kepastian , keterbukaan dan penuh informasi ,ekonomis dan efisiensi prosedur, keadilan dan keamanan;
- 3) Membentuk unit pelayanan umum dan perizinan terpadu (pelayanan dalam satu atap);
- 4) Peningkatan kinerja birokrasi : penerapan inovasi berupa perampingan birokrasi, peningkatan SDM, profesionalitas aparatur;

- 5) Data base yang *up to date* mengenai kebijakan dan peta potensi daerah yang berkaitan dengan kawasan , sarana prasarana , kegiatan yang akan dilakukan privatisasi atau kerjasama dan siap untuk diakses melalui internet.

e. Pembentukan Regulasi Yang Mendorong Termobilisasinya Pembiayaan Oleh Swasta Dan Masyarakat

Langkah ini diarahkan untuk mobilitas potensi swasta dan masyarakat untuk pendanaan kegiatan pembangunan melalui penciptaan kerangka regulasi yang merupakan langkah strategis pemerintah kabupaten sebagai penyediaan intensif kebijakan non fiskal.

f. Efektifitas dan Efisiensi Belanja APBD

Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja diarahkan pada upaya untuk mengakomodasikan pelayanan sosial dasar dan menstimulasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas urusan dilakukan melalui belanja langsung pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6.2.3. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro baik Bank dan Non Bank diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi disektor riil lokal pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan. Kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) yang menjadi standar operasional Bank Umum dan menjadi hambatan disektor usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan akan mampu diatasi oleh lembaga keuangan mikro ini. Kelembagaan Keuangan mikro ini non Bank dapat diintroduksi dan diintensifkan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa/kelurahan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Disamping itu kelembagaan keuangan mikro dapat pula diintroduksi sesuai dengan budaya lokal untuk memberikan peran intermediasi secara praktis, efektif dan mudah.

Strategi optimalisasi lembaga keuangan mikro adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan, hal ini diwujudkan melalui pengembangan kerangka regulasi bagi keuangan mikro;
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas praktek dan pengolahan ;
- c. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya finansial.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat diwujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangkalan di setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

7.1. KAIDAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan :

- a. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD;
- b. Pedoman dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD di Kabupaten Bangkalan;
- c. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronasi dengan arah pembangunan di kabupaten dan kota serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

d. Acuan

- d. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

7.2. PRASYARAT

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bangkalan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan, tiga pilar *Good Governance* yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan adalah : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektifitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk melihat atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator

untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dengan legitimasinya di mata rakyat.

Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau obyek pembangunan belaka, melainkan merupakan subyek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang stral, strategis dan penting.

Tiga pilar *Good Governance* sebagaimana di atas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan *stakeholders* terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilakukan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan sangat tergantung komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan daerah serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI BANGKALAN

R. KH. FUAD AMIN, S.Pd